

**LAPORAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2025**



**DINAS TENAGA KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan terhadap keberhasilan dan/atau kegagalan organisasi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan serta kontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati Magetan. Di samping itu, laporan ini memuat informasi secara transparan tentang pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan yaitu Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja.

Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Laporan kinerja juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan Laporan Kinerja ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja di tahun mendatang.

Magetan, 2026

KEPALA DINAS TENGA KERJA
KABUPATEN MAGETAN

Drs.ARIEF RIDWAN, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196605161986031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI	2
C. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI.....	4
D. SUMBER DAYA ORGANISASI	4
1. Kepegawaian	4
2. Sarana dan Prasarana.....	6
3. Anggaran (setelah perubahan).....	7
E. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN UTAMA PERANGKAT DAERAH.....	7
F. LANDASAN HUKUM	8
G. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026 (Berdasarkan RPD 2024-2026).....	10
1. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2024-2026 (berdasarkan Renstra RPD)	11
Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2024-2026	12
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026	13
B. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 (Berdasarkan RPJMD 2025-2029)	15
1. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2025-2029	17
2. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025-2029	18
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029	20
C. RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	26
D. RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025.....	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	40
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025	41
1. Target dan Realisasi Kinerja (Induk) dan Perubahan Tahun 2025	41
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	53
3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	57
4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, standar Provinsi atau capaian kinerja Pemerintah Daerah sekitarnya;	58
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan:	60
B. INOVASI TAHUN 2025	65

BAB IV PENUTUP	67
A. SIMPULAN	67
B. RENCANA AKSI TAHUN 2026.....	69
LAMPIRAN.....	71
A. Matriks Renstra RPD dan RPJMD	71
B. Indikator Kinerja Utama RPD dan RPJMD.....	112
C. Matriks Renja Tahun 2025 dan Perubahannya	121
D. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025 dan perubahannya	148
E. Pengukuran Kinerja	153
F. Pohon Kinerja	154
G. Rencana Aksi Tahun 2026.....	155

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja tahun n adalah capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah yang sudah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja (PK) perangkat daerah tahun n secara berjenjang yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Tenaga Kerja selaku unsur pembantu Bupati, khususnya dalam bidang tenaga kerja, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Tenaga Kerja sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2025 bertujuan untuk:

1. Sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan;
2. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Tenaga Kerja pada tahun berikutnya.

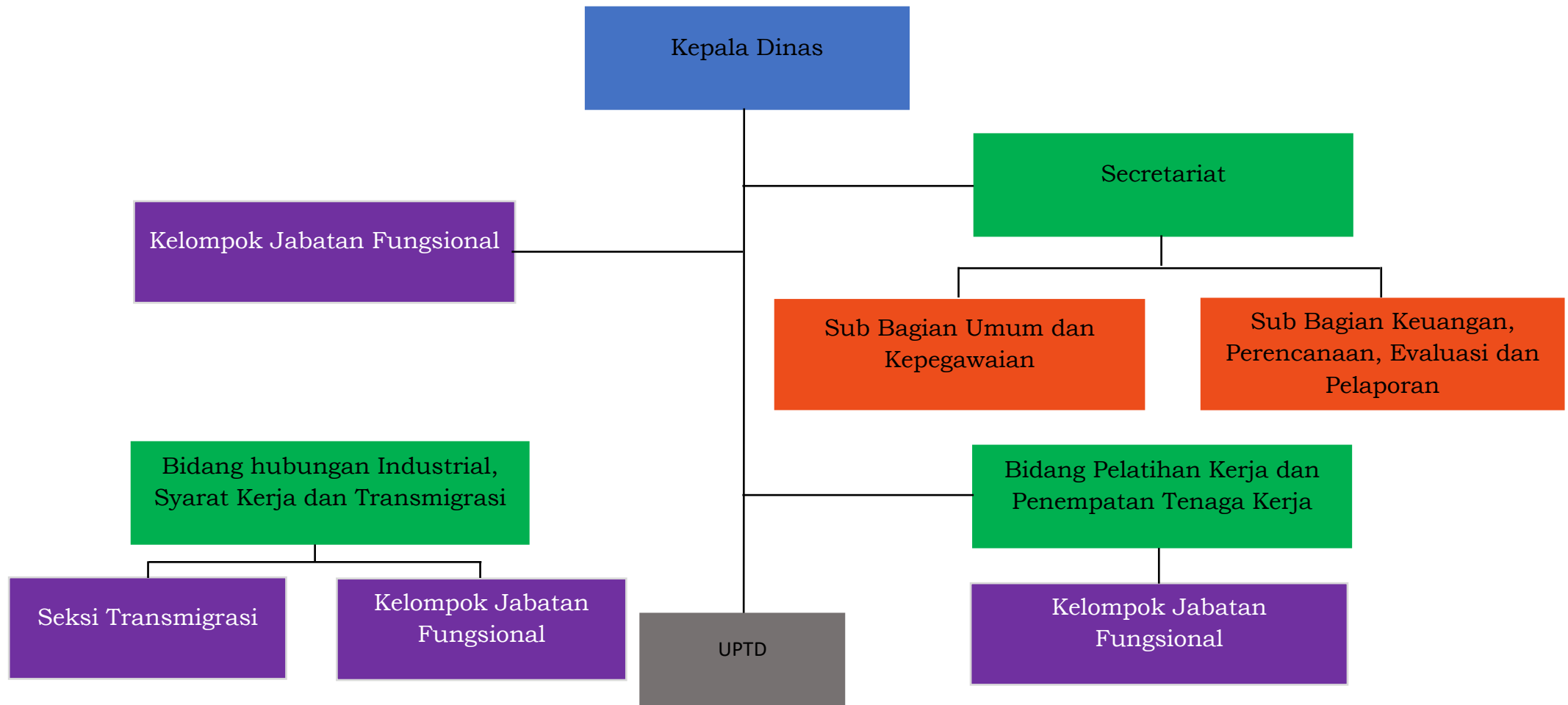
B. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kabupaten Magetan, Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja;
4. Bidang Hubungan Industrial; dan
5. UPTD;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut bagan susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan.

Gambar 1.1.
Susunan Organisasi
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan



C. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan, Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya tersebut Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. SUMBER DAYA ORGANISASI

1. Kepegawaian

Berjalannya organisasi sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, Dinas Tenaga Kerja didukung oleh pegawai sebanyak 35 orang, dengan rincian sebagai berikut:

a. Rencana Kebutuhan dan Realisasi Pegawai

Tabel 1.1.
Rencana Kebutuhan dan Realisasi Pegawai
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan
Per 31 Desember 2025

No.	Jabatan	Kebutuhan (orang)	Realisasi (orang)	Kekurangan /Kelebihan (orang)
1	Kepala Dinas	1	1	0
2	Sekretaris Dinas	1	0	-1
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	0
4	Penelaah Teknik Kebijakan	2	1	-1
5	Fasilitator Pemerintahan	1	1	0
6	Pengadministrasi Perkantoran	2	1	-1
7	Pengolah Data dan Informasi	2	0	-2
8	Operator Layanan Operasional	4	3	-1
9	Pengadministrasi Perkantoran	1	1	0
10	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	1	0
11	Penelaah Teknik Kebijakan	1	0	-1
12	Fasilitator Pemerintahan	2	2	0

No.	Jabatan	Kebutuhan (orang)	Realisasi (orang)	Kekurangan /Kelebihan (orang)
13	Penata layanan Operasional	1	1	0
14	Pengolah Data dan Informasi	2	2	0
15	Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja	1	1	0
16	JF Instruktur Ahli Muda	1	1	0
17	JF Pengantar Kerja Ahli Muda	1	1	0
18	JF Pengantar Kerja Ahli Pertama	1	1	0
19	Penelaah Teknik Kebijakan	1	1	0
20	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	1	1	0
21	Penata layanan Operasional	1	0	-1
22	Pengolah Data dan Informasi	3	2	-1
23	Kepala Bidang Hubungan iNdustrial, Syarat Kerja dan Transmigrasi	1	1	0
24	Kepala Seksi Transmigrasi	1	1	0
25	Penelaah Teknik Kebijakan	1	0	-1
26	JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda	1	1	0
27	Penelaah Teknik Kebijakan	2	2	0
28	Jabatan Fungsional Tertentu			
29	JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	1	1	0
30	JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	1	0	-1
31	JF Analisis Hukum Ahli Pertama	1	1	0
32	JF Pengantar Kerja Ahli Pertama	3	0	-3
33	JF Pengantar Kerja Ahli Muda	1	0	-1
34	JF Pengantar Kerja Ahli Madya	1	0	-1
35	JF Instruktur Ahli Pertama	2	2	0
36	JF Instruktur Ahli Muda	1	0	-1
37	JF Instruktur Ahli Madya	1	0	-1
38	JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama	2	0	-2
39	JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya	1	0	-1
40	JF Perencana Ahli Pertama	1	0	-1
41	JF Perencana Ahli Muda	1	0	-1
42	JF Arsiparis Terampil	1	0	-1
43	JF Arsiparis Mahir	1	0	-1
44	JF Arsiparis Penyelia	1	0	-1
45	JF Arsiparis Ahli Pertama	1	0	-1
	Jumlah	59	32	-27

b. Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Tabel 1.2.
Pangkat/Golongan Ruang Pegawai
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan
Per 31 Desember 2025

No.	Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah (orang)
1	Pembina Utama/IV-d	
2	Pembina Utama Muda/IV-c	1
3	Pembina Tk.I/IV-b	
4	Pembina/IV-a	1
5	Penata Tk.I/III-d	7
6	Penata/III-c	1
7	Penata Muda Tk.I/III-b	6
8	Penata Muda/III-a	10
9	Pengatur Tk.I/II-d	1
10	Pengatur/II-c	1
11	Pengatur Muda Tk.I/II-b	0
12	Pengatur Muda/IIa	4
	Jumlah	32

c. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.3.
Tingkat Pendidikan Pegawai
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan
Per 31 Desember 2025

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Strata 3	
2	Strata 2	3
3	Strata 1/Sederajad	20
4	Diploma	4
5	SMA/Sederajad	4
6	SMP/Sederajad	1
7	SD/Sederajad	
	Jumlah	32

c. Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki-laki	20
2	Perempuan	12
	Jumlah	32

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana berupa aset tetap yang ada di Dinas Tenaga Kerja per 31 Desember 2025 dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.4
Aset Tetap Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan
per 31 Desember 2025
(Sebelum Penyusutan)

No.	Aset Tetap	Per 31 Desember Tahun 2024 (Rp)	Mutasi Tahun 2025		Per 31 Desember Tahun 2025 (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
	Tanah	67.000.000			67.000.000
	Peralatan dan Mesin	1.793.428.660	38.578.175		1.832.006.835
	Gedung dan Bangunan	1.387.688.823			1.387.688.823
	Jumlah	3.248.117.483	38.578.175		3.286.695.658

3. Anggaran (setelah perubahan)

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan, telah disusun program dan kegiatan dengan anggaran yang telah ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun 2025. Alokasi anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 5.744.236.183,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.5
Anggaran Belanja Dinas Tenaga Kerja
Tahun Anggaran 2025 dan 2026
(Sebelum Penyusutan)

Program	Tahun 2025	Tahun 2026
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.410.386.503	3.519.953.347
Program Perencanaan Tenaga Kerja	106.606.800	7.500.00
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.178.523.650	604.000.000
Program Penempatan Tenaga Kerja	423.292.100	255.300.050
Program Hubungan Industrial	625.427.130	323.129.950
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	0	48.000.000

E. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN UTAMA PERANGKAT DAERAH

Permasalahan adalah perbedaan (gap) antara kondisi riil dengan kondisi ideal dan/atau perbedaan antara kondisi riil dengan ekspektasinya. Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerjasesuai tugas dan fungsinya tahun 2025 adalah:

1. Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
2. Terbatasnya kesempatan kerja terutama sektor formal;
3. Masih rendahnya perlindungan tenaga kerja;
4. Terbatasnya kuota pemberangkatan transmigrasi.

F. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Dinas Tenaga kerja ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025; / Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangk Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029; dan
9. Keputusan Bupati Magetan 100.3.4.2/320/Kept./403.013/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama, Tujuan/Sasaran dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029.

G. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun n berpedoman pada PERMENPAN-RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan sistematika sebagai berikut:

- | | |
|----------------|--|
| BAB I | PENDAHULUAN
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (<i>strategic issued</i>) yang sedang dihadapi organisasi.. |
| BAB II | PERENCANAAN KINERJA
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi |

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026 (Berdasarkan RPD 2024-2026)

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Tujuan Kepala Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya dimiliki dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan mengalami masa transisi dengan ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2024-2026.

Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan yang disusun dalam rangka mendukung Tujuan Bupati Magetan, Sasaran Strategis serta Strategi dan Arah Kebijakan yang tertuang dalam RPD Kabupaten Magetan periode 2024-2026 dapat dirumuskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Keterkaitan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan dengan Tujuan
Kabupaten Magetan
Tahun 2024-2026

Tujuan (RPD) ke-2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Indikator: Indeks Pembangunan Manusia
Sasaran (RPD) ke-3 Meningkatnya Kualitas SDM Ketenagakerjaan Indikator: Tingkat Pengangguran Terbuka
Tujuan (RPD) ke-3: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indikator: Persentase Penduduk Miskin
Sasaran (RPD) ke-2 Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Indikator: Pendapatan Perkapita
Tujuan (Renstra) Meningkatkan penyerapan dan partisipasi angkatan kerja Indikator: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Sasaran (Renstra) ke-2 Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja Indikator: Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
Tujuan (RPD) ke-3: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indikator: Persentase Penduduk Miskin

Sasaran (RPD) ke-3 Menurunnya Kantong-Kantong Kemiskinan Indikator: Koefisien Gini/ Indeks Gini
Tujuan (Renstra) Meningkatkan penyerapan dan partisipasi angkatan kerja Indikator: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Sasaran (Renstra) ke-1 Meningkatnya Akses ke Peluang Kerja Indikator: Persentase penyerapan tenaga kerja

1. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2024-2026 (berdasarkan Renstra RPD)

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sebagaimana Tujuan yang telah ditetapkan, untuk mendukung keberhasilan tersebut perlu ditetapkan sasaran strategis beserta indikator dan target kinerja Dinas Tenaga Kabupaten Magetan periode 2024-2026 (Tahun renstra). Tujuan dan Sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan
Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN RENSTRA		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan penyerapan dan partisipasi angkatan kerja		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	78,70	78,92	79,14
		1.1 Meningkatnya Akses Ke Peluang Kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja	%	75	76	77

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN RENSTRA		
						2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)
		1.2	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Juta rp/tenaga kerja	35,35	35,42	35,49
			Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja		90,10	90,17	90,24
			penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Tenaga Kerja	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja		85,50	86	86,50

Sumber: Renstra Dinas Tenaga Kerja periode 2024-2026

2. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2024-2026

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut:

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan
Tahun 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan penyerapan dan partisipasi angkatan kerja	1. Meningkatkan Akses Ke Peluang Kerja	Penguatan layanan penempatan kerja	Menyelenggarakan bursa kerja untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan Optimalisasi pola penempatan AKAL, AKAD, dan AKAN
		Peningkatan akses informasi pasar kerja	Meningkatkan sebaran informasi lowongan dan peluang kerja

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan koordinasi dengan sektor swasta	Membuat program – program kerjasama dengan perusahaan untuk memfasilitasi perekrutan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar
	2. Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatkan daya saing tenaga kerja dengan peningkatan kompetensi yang sesuai kebutuhan pasar kerja	Meningkatkan kemampuan tenaga kerja lokal untuk bersaing di pasar tenaga kerja melalui latihan kerja disertai dengan perolehan sertifikat profesi yang sesuai dengan kebutuhan kerja, terutama bagi pencari kerja kalangan miskin
		Menjaga dan meningkatkan pengelolaan iklim kerja yang kondusif untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan serta penguatan, pengelolaan data dan informasi Hubungan Industrial melalui pemberdayaan Lembaga Kerjasama Bipartite dan tripartite, pengesahan Peraturan Perusahaan, peningkatan kepesertaan Jaminan sosial tenaga kerja	Optimalisasi peran Lembaga Kerjasama Bipartite dan Lembaga Kerjasama Tripartite, mendorong perusahaan dalam kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas sarana kesejahteraan bagi tenaga kerja baik diluar maupun di dalam hubungan kerja, serta pengembangan data dan informasi hubungan industrial dalam pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja Bersama
	Meningkatnya kualitas pelayanan public pada urusan tenaga kerja dan transmigrasi	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan	Menyusun standart pelayanan dan prosedur pelayanan yang baik serta meningkatkan kemampuan ASN untuk memberikan pelayanan prima

3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan
Tahun 2024-2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI /RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Sasaran 1: Meningkatnya Akses Ke Peluang Kerja	1.1	Persentase penyerapan tenaga kerja	%	<p>Pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan baik di dalam atau luar negeri (Perpres No. 36 Tahun 2020).</p> <p>Pencari kerja yang ditempatkan adalah pencari kerja yang diterima bekerja oleh pemberi kerja.</p> <p>Pencari kerja terdaftar adalah pencari kerja yang mendaftarkan dan tercatat pada dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani bidang ketenagakerjaan.</p>	(\sum pencari kerja yang ditempatkan/ \sum pencari kerja yang terdaftar) x 100	Bidang Pelatihan Kerja Dan Penempatan Tenaga Kerja
Sasaran 2: Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	2.1	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Juta rp/tenaga kerja	PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar	PDRB tahun berjalan atas dasar harga konstan / \sum tenaga kerja	Bidang Pelatihan Kerja Dan Penempatan Tenaga Kerja Bidang Hubungan Industrial,

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
			DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI /RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.		Syarat Kerja Dan Transmigrasi

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024-2026

B. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 (Berdasarkan RPJMD 2025-2029)

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya dimiliki dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025-2029.

Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan yang disusun dalam rangka mendukung Visi dan Misi Bupati Magetan, Tujuan dan Sasaran Strategis serta Strategi dan Arah Kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magetan periode 2025-2029 dapat dirumuskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Keterkaitan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan dengan
Visi dan Misi Bupati Magetan
Tahun 2025-2029

Visi (RPJMD): Magaten Nyaman, Maju, Berkelanjutan
Misi (RPJMD)
1. SDM ANDAL - Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Andal dan Berdaya Saing Kuat
3. BIROKRASI TANGGAP - Membangun Birokrasi Pemerintahan yang professional, responsif, adaptif, dan transparan
4. MASYARAKAT SEJAHTERA - Meningkatkan Kesejahteraan dengan pengentasan Kemiskinan melalui pemberdayaan Masyarakat, perlindungan sosial dan pembangunan wilayah pedesaan

5. EKONOMI KUAT - Peningkatan daya Tarik investasi ekonomi kreatif, pariwisata, perluasan lapangan kerja dan menumbuhkan kewirausahaan untuk mengurangi pengangguran
Tujuan (RPJMD) ke-1 Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis Indikator: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Sasaran (RPJMD) ke-1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Indikator: Indeks Pendidikan
Tujuan (Renstra) : Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja Indikator: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Sasaran (Renstra) ke-2 Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja Indikator: Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Tujuan (RPJMD) ke-2 Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Indikator: Pertumbuhan Ekonomi
Sasaran (RPJMD) ke-5 Menurunnya Angka Pengangguran melalui Perluasan Lapangan Kerja dan Menumbuhkan Kewirausahaan Indikator: TPT
Tujuan (Renstra) : Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja Indikator: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Sasaran (Renstra) ke-1 Meningkatnya Akses ke Peluang Kerja Indikator: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Sasaran (Renstra) ke-2 Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja Indikator: Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Tujuan (RPJMD) ke-3 Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Responsif, Adaptif dan Transparan Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran (RPJMD) ke-1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Indikator: Nilai SAKIP Pemerintah Daerah
Tujuan (Renstra) : Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja Indikator: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Sasaran (Renstra) ke-3 Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Tenaga Kerja Indikator 1: Nilai SAKIP Indicator 2: Indeks Kepuasan Masyarakat

Tujuan (RPJMD) ke-4 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Indikator: Angka Kemiskinan
Sasaran (RPJMD) ke-2 Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat
Tujuan (Renstra) : Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja Indikator: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Sasaran (Renstra) ke-2 Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja Indikator: Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

1. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2025-2029

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk mendukung keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran strategis beserta indikator dan target kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan periode 2025-2029. Tujuan dan Sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.6
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan
Tahun 2025-2029

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN RENSTRA				
					2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,18	3,08	2,98	2,87	2,78
		1.1 Meningkatkan akses ke peluang kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	77,10	77,15	77,20	77,25	77,30

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN RENSTRA				
						2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		1.2	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rp/Tenaga Kerja	37,14	37,21	37,28	37,35	37,42
		1.3	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Tenaga Kerja	Nilai SAKIP	Nilai	90,17	91	91,15	91,30	91,45
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	86	87,75	87,85	87,95	88,05

Sumber: Renstra Dinas Tenaga Kerja periode 2025-2029

2. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025-2029

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut:

Tabel 2.7
Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan
Tahun 2025-2029

VISI : Magetan Nyaman, Maju, Berkelanjutan			
<p>MISI ke-1 : SDM ANDAL - Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Andal dan Berdaya Saing Kuat</p> <p>ke-3 : BIROKRASI TANGGAP - Membangun Birokrasi Pemerintahan yang professional, responsif, adaptif, dan transparan</p> <p>ke-4 : MASYARAKAT SEJAHTERA - Meningkatkan Kesejahteraan dengan pengentasan Kemiskinan melalui pemberdayaan Masyarakat, perlindungan sosial dan pembangunan wilayah pedesaan</p> <p>ke-5: EKONOMI KUAT - Peningkatan daya Tarik investasi ekonomi kreatif, pariwisata, perluasan lapangan kerja dan menumbuhkan kewirausahaan untuk mengurangi pengangguran</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	1. Meningkatnya akses ke peluang kerja	1. Penguatan regulasi, kelembagaan, dan pemetaan pasar kerja	1. Fasilitasi penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri yang aman dan legal
	2. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	2. Perluasan akses dan kesempatan kerja dengan mendorong penciptaan lapangan kerja baru di sektor formal dan informal	2. Pemberdayaan PMI Purna dan keluarga PMI
	3. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Tenaga Kerja	3. Peningkatan kualitas SDM tenaga kerja 4. Peningkatan daya saing dan perlindungan tenaga kerja	3. Peningkatan peran serta kelompok rentan (difabel, perempuan kepala keluarga, pemuda desa, masyarakat miskin) dalam pelatihan kerja, kewirausahaan, dan penempatan tenaga kerja 4. Optimalisasi pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan fasilitasi uji kompetensi

			<p>5. Peningkatan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja dengan sertifikasi akreditasi</p> <p>6. Pemetaan potensi dan Link & match kebutuhan tenaga kerja dengan dunia kerja</p> <p>7. Peningkatan kepesertaan dan kepatuhan pemberi kerja terhadap program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan</p> <p>8. Sosialisasi dan pembinaan kepada pengusaha terkait perlindungan hak normatif pekerja</p> <p>9. Penguatan kelembagaan hubungan industrial (KLS Bipartit dan Tripartit)</p>
--	--	--	--

3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Indikator Kinerja Utama
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan
Tahun 2025-2029

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Sasaran 1: Meningkatnya akses ke peluang kerja	1.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	<p>Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas</p> <p>Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran</p>	<p>TPAK = (Jumlah Angkatan Kerja/Jumlah penduduk usia kerja) x 100%</p>	Badan Pusat Statistik (BPS)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Sasaran 2: Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	2.1	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Juta Rp/Tenaga Kerja	<p>PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar</p> <p>Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.</p>	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja = PDRB tahun berjalan atas dasar harga konstan/ Jumlah tenaga kerja	Badan Pusat Statistik (BPS)
	3.1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Tenaga Kerja	Nilai SAKIP	<p>Nilai SAKIP =</p> <ul style="list-style-type: none"> - bobot 30 komponen perencanaan - bobot 30 komponen pengukuran kinerja - bobot 15 komponen pelaporan kinerja - bobot 25 komponen evaluasi <p>Komponen perencanaan, yang dinilai:</p>		Inspektora t Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
			DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			<ol style="list-style-type: none"> 1. ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>) 3. perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan <p>Komponen pengukuran, yang dinilai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>reward dan punishment</i>, serta 		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
			DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			<p>penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.</p> <p>Komponen pelaporan, yang dinilai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaporan kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian IKU dengan Analisa yang lengkap 3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan 4. Memuat rencana aksi tahun berikutnya <p>Komponen evaluasi, yang dinilai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE tindaklanjut 5. Menyusun rencana aksi atas tindaklanjut LHE 		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
			DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya		
	Indeks Kepuasan Masyarakat		9 parameter IKM: 1. Persyaratan 2. System mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan prasarana	(Nilai IKM= Jumlah indeks per parameter/jumlah parameter) x 25	Laporan IKM Dinas Tenaga Kerja

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025-2029

C. RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Rencana Kerja (Renja) Tahunan merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025:

Tabel 2.9
Rencana Kerja Tahun 2025
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Meningkatkan penyerapan dan partisipasi angkatan kerja		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	78,92	
		1.1	Meningkatnya Akses Ke Peluang Kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja	%	76
		1.2	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Juta rp/tenaga kerja	35,42
		1.3	Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Tenaga Kerja	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja		90,17
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja		86	

Sumber: Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja:

Tabel 2.10
Program, Kegiatan, dan Pagu Anggaran
Dinas Tenaga Kerja
Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Dinas Tenaga Kerja terhadap layanan kesekretariatan Dinas Tenaga Kerja	Indeks	81	3.555.470.028
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	Dokumen	21	38.102.820
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	13	20.875.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8	17.227.820
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	Persen	89	2.910.917.208
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	23	2.909.167.208
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	61	1.750.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur	Orang	32	39.250.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	32	29.625.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	32	9.625.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket	12	170.375.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	5.000.000

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	30.875.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	12.500.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	20.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	15.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12	13.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	74.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	327.325.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	40.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	8	11.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	276.325.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Unit	15	69.500.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	47.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	12.500.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10.000.000
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen perencanaan tenaga kerja	Persen	100	133.750.000

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Disusun	Dokumen	1	133.750.000
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	1	70.000.000
	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang Mampu Menyusun RTK Mikro	Orang	20	63.750.000
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten	Persen	85	847.422.000
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi	Persen	85	753.200.000
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	160	733.200.000
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	10	15.000.000
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	2	5.000.000
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Terakreditasi	Lembaga	7	66.722.000
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	20	66.722.000
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti Kegiatan Peningkatan dan Pengukuran Produktivitas	Orang	30	27.500.000
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokumen	1	27.500.000
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang mendapat fasilitas penempatan kerja	Persen	100	512.750.000
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Fasilitas Pelayanan Antar Kerja	Orang	1500	228.500.000
	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang	1500	44.000.000

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	30	32.000.000
	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	65	152.500.000
	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang Mendapatkan Izin, Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Lembaga	5	5.000.000
	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Lembaga	5	5.000.000
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah penyediaan lowongan informasi pasar kerja	Lowongan	50	200.750.000
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang	2500	3.000.000
	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Orang	750	197.750.000
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Pekerja Migran (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	25	78.500.000
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	25	45.000.000
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang	25	33.500.000
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian perselisihan kasus ketenagakerjaan	Persen	100	300.180.480
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola yang baik	Perusahaan	5	8.500.000

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	1	8.500.000
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kasus ketenagakerjaan secara bipartite	Perkara	4	291.680.480
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang Dicegah	Perkara	40	48.000.000
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Perkara	4	12.400.000
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	1	46.000.000
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	1671	185.280.480
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penempatan transmigran yang terseleksi dan terlatih	Persen	100	76.100.000
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah calon transmigran yang terseleksi, mendapat pelatihan dan diberangkatkan	KK	2	76.100.000
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	KK	2	76.100.000

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada tanggal 13 bulan Januari tahun 2025 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.11
Perjanjian Kinerja
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan
Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya Akses Ke Peluang Kerja	1.1	Persentase penyerapan tenaga kerja	%	76
2	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	2.1	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Juta rp/tenaga kerja	35,42
3	Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Tenaga Kerja	3.1	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja		90,17
		3.2	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja		86

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025

D. RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.12
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan penyerapan dan partisipasi angkatan kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,18

	1.1	Meningkatnya Akses Ke Peluang Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	77,10
	1.2	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Juta rp/tenaga kerja	37,14
	1.3	Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Tenaga Kerja	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja	Skor	90,17
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja	Skor	86

Sumber: Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian rencana kerja perubahan yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja:

Tabel 2.13
Program, Kegiatan, dan Pagu Anggaran Perubahan
Dinas Tenaga Kerja
Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Dinas Tenaga Kerja terhadap layanan kesekretariatan Dinas Tenaga Kerja	Indeks	83	3.410.386.503
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	Dokumen	21	10.920.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	13	3.990.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8	6.930.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	Persen	89	2.872.674.453
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	308	2.871.384.153
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	61	1.290.300
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur	Orang	32	36.317.350
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	32	28.475.500
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	32	7.841.850
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket	12	138.614.500
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	5.000.000

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	55.458.600
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	14.708.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	19.963.350
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	7.704.550
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12	10.780.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	25.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	273.360.200
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	40.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	8	10.960.100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	222.400.100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Unit	15	78.500.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	47.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	12.500.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	19.000.000

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen perencanaan tenaga kerja	Persen	100	106.606.800
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Disusun	Dokumen	1	106.606.800
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	1	62.389.350
	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang Mampu Menyusun RTK Mikro	Orang	20	44.217.450
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten	Persen	100	1.178.523.650
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi	Persen	100	1.132.742.400
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	280	1.122.577.400
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	10	6.165.000
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	2	4.000.000
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Terakreditasi	Lembaga	7	25.825.600
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	20	25.825.600
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti Kegiatan Peningkatan dan Pengukuran Produktivitas	Orang	30	19.955.650
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokumen	1	19.955.650
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang mendapat fasilitas penempatan kerja	Persen	100	423.292.100
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Fasilitas Pelayanan Antar Kerja	Orang	1500	177.625.400

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang	1500	34.562.950
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	60	19.535.350
	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	65	123.527.100
	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang Mendapatkan Izin, Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Lembaga	5	1.000.000
	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Lembaga	5	1.000.000
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah penyediaan lowongan informasi pasar kerja	Lowongan	500	192.814.000
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang	2500	1.592.000
	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Orang	750	191.222.000
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Pekerja Migran (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	25	51.852.700
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	25	22.852.700
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang	20	29.000.000
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian perselisihan kasus ketenagakerjaan	Persen	100	625.427.130
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola yang baik	Perusahaan	5	1.088.400

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
	hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	1	1.088.400
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kasus ketenagakerjaan secara bipartite	Perkara	4	624.338.730
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang Dicegah	Perkara	40	40.677.250
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Perkara	4	5.298.450
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	1	36.068.550
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	12344	542.294.480
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penempatan transmigran yang terseleksi dan terlatih	Persen	0	0
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah calon transmigran yang terseleksi, mendapat pelatihan dan diberangkatkan	KK	0	0
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	KK	0	0

Sumber: Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025

Perangkat daerah melakukan penyusunan Perjanjian Kinerja perubahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2025. Pada tanggal 3 bulan November tahun 2025 telah ditetapkan Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.14
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya Akses Ke Peluang Kerja	1.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	77,10
2	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	2.1	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Juta rp/tenaga kerja	37,14
3	Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Tenaga Kerja	3.1	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja	Skor	90,17
		3.2	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja	Skor	86

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025

Beberapa perubahan kebijakan perjanjian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan adalah perubahan Tujuan dan Sasaran Kinerja beserta dengan indicator dan target yang disesuaikan dengan rancangan awal Renstra Tahun 2025-2029

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati Magetan, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja. Pengukuran kinerja yang dilakukan masih didasarkan pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus 1: Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rumus 2: Apabila semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:

Tabel 3.1
Kriteria Capaian Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Kategori
	%	Keterangan Persentase	
1.	$\geq 100\%$	Sama dengan atau lebih dari 100 persen	Sangat Berhasil
2.	$75\% \text{ s.d } < 100\%$	Tujuh puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Berhasil
3.	$55\% \text{ s.d } < 75\%$	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh lima persen	Cukup Berhasil
4.	$< 55\%$	Di bawah lima puluh lima persen	Kurang Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi Bupati Magetan. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025.

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

1. Target dan Realisasi Kinerja (Induk) dan Perubahan Tahun 2025

Tabel 3.2
Capaian Kinerja (Induk)
Dinas Tenaga Kerja
Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
Meningkatnya Akses Ke Peluang Kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja	77,50 %	77,61%	100,14	Sangat Berhasil
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	35,42 Juta rp/tenaga kerja	40,04 Juta rp/tenaga kerja	113,04	Sangat Berhasil

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Tenaga Kerja	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja	90,17	90,94	100,85	Sangat Berhasil
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja	86	87,72	102	Sangat Berhasil

Tabel 3.3
Capaian Kinerja (Perubahan)
Dinas Tenaga Kerja
Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
Meningkatnya Akses ke Peluang Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	77,10 %	77,04%	99,92	Berhasil
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	37,14 Juta rp/tenaga kerja	40,04 Juta rp/tenaga kerja	107,81	Sangat Berhasil
Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Tenaga Kerja	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja	90,17 Skor	90,94 Skor	100,85	Sangat Berhasil
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja	86 Skor	87,72 Skor	102	Sangat Berhasil

Capaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator lain yang relevan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.4
Rincian Capaian Kinerja (Perubahan)
Dinas Tenaga Kerja
Tahun 205

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Akses ke Peluang Kerja						
	▪ Indikator Kinerja Sasaran: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)				77,10%		
	Program PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	106.606.800	100.436.081	94,21			
	Sasaran Program Meningkatnya persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja						
	▪ Indikator Kinerja Program: Persentase dokumen perencanaan tenaga kerja				100%	100%	100
	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	106.606.800	100.436.081	94,21			
	Sasaran Kegiatan Tersedianya dokumen perencanaan Tenaga Kerja						
	▪ Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Rincian Output (RO) Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	62.389.350	61.082.120	97,9	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Rincian Output (RO) Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	44.217.450	39.353.961	89	20 Orang	20 Orang	100
	Program PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	423.292.100	312.695.684	73,87			
	Sasaran Program Meningkatnya penempatan tenaga kerja						
	▪ Indikator Kinerja Program Presentase Pencari Kerja yang Mendapat Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja				100%	100%	100
	Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	177.625.400	75.396.648	42,45			

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Sasaran Kegiatan Terlaksananya pelayanan antar kerja						
	▪ Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Fasilitas Pelayanan Antar Kerja				1500 Orang	2613 Orang	174,2
	Rincian Output (RO) Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	34.562.950	33.455.535	96,8	1500 Orang	2028 Orang	135,2
	Rincian Output (RO) Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	19.535.350	19.065.443	97,59	60 Orang	60 Orang	100
	Rincian Output (RO) Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	123.527.100	22.875.670	18,52	65 Orang	20 Orang	30,77
	Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000	1.000.000	100			
	Sasaran Kegiatan Terlaksananya monitoring dan pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)						
	▪ Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang Mendapatkan Izin, Pengawasan dan Pengendalian LPTKS				5 Lembaga	5 Lembaga	100
	Rincian Output (RO) Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	1.000.000	1.000.000	100	5 Lembaga	5 Lembaga	100
	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	192.814.000	191.329.021	99,23			
	Sasaran Kegiatan Tersedianya lowongan kerja						
	▪ Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Penyediaan Lowongan Informasi Pasar						

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Kerja						
	Rincian Output (RO) Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	1.592.000	1.558.965	97,92	2500 Orang	2613 Orang	104,52
	Rincian Output (RO) Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	191.222.000	189.770.056	99,24	750 Orang	720 Orang	99,24
	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	51.852.700	46.528.980	89,73			
	Sasaran Kegiatan Terlaksananya pelatihan dan perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan)						
	▪ Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Calon Pekerja Migran (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				25 Orang	25 Orang	100
	Rincian Output (RO) Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	22.852.700	20.502.600	89,72	25 Orang	25 Orang	100
	Rincian Output (RO) Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan	29.000.000	26.026.380	89,75	20 Orang	20 Orang	100
2.	Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja						
	▪ Indikator Kinerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja				37.14 juta rp/tenaga kerja		
	Program PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.178.523.650	1.131.385.930	96			
	Sasaran Program Meningkatnya persentase peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi						
	▪ Indikator Kinerja Program				100%	100%	100

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten						
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.132.742.400	1.091.320.089	96,34			
	Sasaran Kegiatan Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi						
	▪ Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi				100%	100%	100
	Rincian Output Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.122.577.400	1.081.799.414	96,37	280 Orang	280 Orang	100
	Rincian Output Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	6.165.000	5.699.500	92,45	10 Lembaga	10 Lembaga	100
	Rincian Output Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	4.000.000	3.821.175	95,53	2 Unit	2 Unit	100
	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	25.825.600	22.179.022	85,88			
	Sasaran Kegiatan Terlaksananya pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						
	▪ Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Terakreditasi				7 Lembaga	7 Lembaga	100
	Rincian Output Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	25.825.600	22.179.022	85,88	20 Lembaga	20 Lembaga	100
	Kegiatan	19.955.650	17.886.819	89,63			

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
	Sasaran Kegiatan Tersedianya dokumen hasil pengukuran produktivitas tenaga kerja						
	▪ Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti Kegiatan Peningkatan dan Pengukuran Produktivitas			89,63	30 Orang	30 Orang	100
	Rincian Output Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	25.825.600	22.179.022	85,88	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Program PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	625.427.130	620.889.910	99,27			
	Sasaran Program Meningkatnya persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)						
	▪ Indikator Kinerja Program Presentase Penyelesaian Perselisihan Kasus Ketengakerjaan				100%	100%	100
	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	19.955.650	17.886.819	89,63			
	Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja						

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan						
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola yang baik 				5 Perusahaan	5 Perusahaan	100
	Rincian Output Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	19.955.650	17.886.819	89,63	1 Laporan	1 Laporan	100
	Kegiatan Terlaksananya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	624.338.730	619.252.852	99,19			
	Sasaran Kegiatan Jumlah penyelesaian kasus ketenagakerjaan secara bipartit						
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah penyelesaian kasus ketenagakerjaan secara bipartit 				4 Perkara	0 Perkara	
	Rincian Output Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.677.250	39.841.812	97,95	40 Perkara	40 Perkara	100
	Rincian Output Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.298.450	5.272.960	99,52	4 Perkara	0 Perkara	
	Rincian Output Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	36.068.550	33.690.560	93,41	1 Lembaga	1 Lembaga	100
	Rincian Output Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial	542.294.480	541.032.520	99,77	12344 Orang	12344 Orang	100

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja						
3	Sasaran Strategis 3 Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Tenaga Kerja						
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indikator Kinerja Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja ▪ Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja 				90,17 Skor 86 Skor	90,94 Skor 87,72 Skor	
	Program PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.178.523.650	1.131.385.930	96			
	Sasaran Program Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui birokrasi yang profesional serta pelayanan administrasi publik yang efektif dan efisien pada perangkat daerah pengampu urusan bidang tenaga kerja						
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indikator Kinerja Program Kepuasan ASN Dinas Tenaga Kerja terhadap layanan kesekretariatan Dinas Tenaga Kerja 				83 Indeks	86,83 Indeks	104,61
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.920.000	10.846.101	99,32			
	Sasaran Kegiatan Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu						
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu 				21 Dokumen	21 Dokumen	100
	Rincian Output Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.990.000	3.971.594	99,54	13 Dokumen	13 Dokumen	100
	Rincian Output Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.930.000	6.874.507	99,20	8 Dokumen	8 Dokumen	100

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.872.674.453	2.704.511.977	94,15			
	Sasaran Kegiatan Terpenuhinya layanan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu						
	▪ Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah				89	93.82	105,42
	Rincian Output Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	2.871.384.153	2.703.243.058	94,14	308 Orang/bulan	308 Orang/bulan	100
	Rincian Output Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.290.300	1.268.919	98,34	61 Laporan	61 Laporan	100
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36.317.350	33.782.773	93,02			
	Sasaran Kegiatan Terpenuhinya layanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar						
	▪ Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur				32 Orang	32 Orang	100
	Rincian Output Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	28.475.500	27.879.337	97,91	32 Orang	32 Orang	100
	Rincian Output Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7.841.850	5.903.436	75,28	32 Orang	32 Orang	100
	Kegiatan	138.614.500	136.140.048	98,21			

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
	Sasaran Kegiatan Terpenuhinya layanan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar						
	▪ Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 Paket	12 Paket	100
	Rincian Output Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	4.950.185	99	2 Paket	2 Paket	100
	Rincian Output Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.458.600	54.460.470	98,20	12 Paket	12 Paket	100
	Rincian Output Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	14.708.000	14.283.497	97,11	2 Paket	2 Paket	100
	Rincian Output Tersedianya Bahan Logistik Kantor	19.963.350	19.562.460	97,99	12 Paket	12 Paket	100
	Rincian Output Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	7.704.550	7.490.019	97,22	6 Paket	6 Paket	100
	Rincian Output Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.780.000	10.400.000	96,47	12 Dokumen	12 Dokumen	100
	Rincian Output Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000	24.993.417	99,97	12 Laporan	12 Laporan	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	273.360.200	260.747.727	95,39			
	Sasaran Kegiatan Terpenuhinya kebutuhan penunjang operasional pemerintah daerah						
	▪ Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang				12 Laporan	12 Laporan	100

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Urusan Pemerintahan Daerah						
	Rincian Output Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000	36.087.727	90,22	12 Laporan	12 Laporan	100
	Rincian Output Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.960.100	10.960.100	100	8 Laporan	8 Laporan	100
	Rincian Output Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	222.400.100	213.700.000	96,09	12 Laporan	12 Laporan	100
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.500.000	76.006.830	96,82			
	Sasaran Kegiatan Ketersediaan dan keberfungsian aset daerah yang optimal untuk mendukung kegiatan pemerintahan						
	▪ Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	100
	Rincian Output Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.000.000	46.302.330	98,52	2 Unit	2 Unit	100
	Rincian Output Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.500.000	11.204.500	89,64	11 Unit	11 Unit	100
	Rincian Output Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.000.000	18.500.000	97,37	2 Unit	2 Unit	100

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

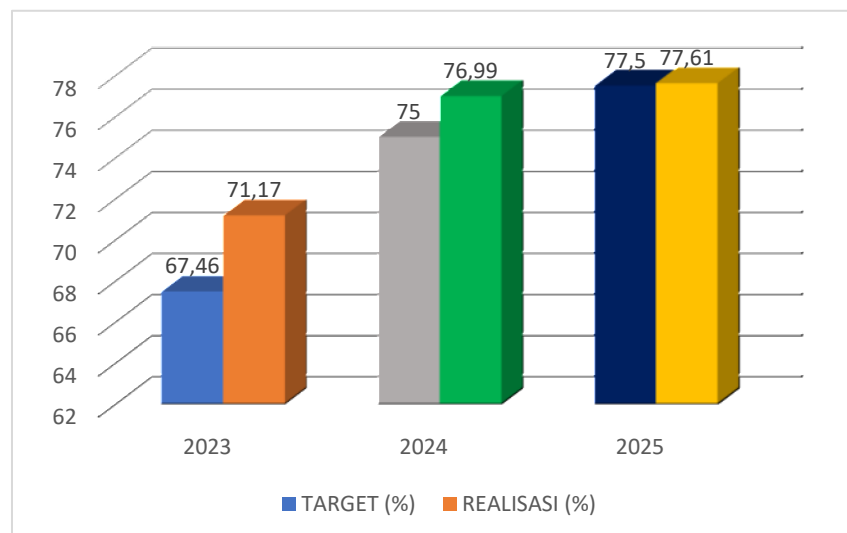
Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Akses Ke Peluang Kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja	67,46%	71,17%	105,50	75 %	76,99%	102,65	77,50 %	77,61%	100,14
Meningkatnya Akses Ke Peluang Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	-	78,48%	-	-	77,04%	-	77,10%	74,70%	96,89
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	-	35,28 Juta rp/tenaga kerja	-	35,35 Juta rp/tenaga kerja	37,07 Juta rp/tenaga kerja	104,87	37,14 Juta rp/tenaga kerja	40,04 Juta rp/tenaga kerja	107,81
Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Tenaga Kerja	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja	-	86,53 Skor	-	90,10 Skor	90,03 Skor	99,92	90,17 Skor	90,94 Skor	100,85
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja	-	84,39 Skor	-	85,50 Skor	85,55 Skor	100,06	86 Skor	87,72 Skor	102

Perbandingan capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya Akses ke Peluang Kerja

a. Persentase penyerapan tenaga kerja

Grafik 3.1
Capaian Realisasi Sasaran Strategis 1.1



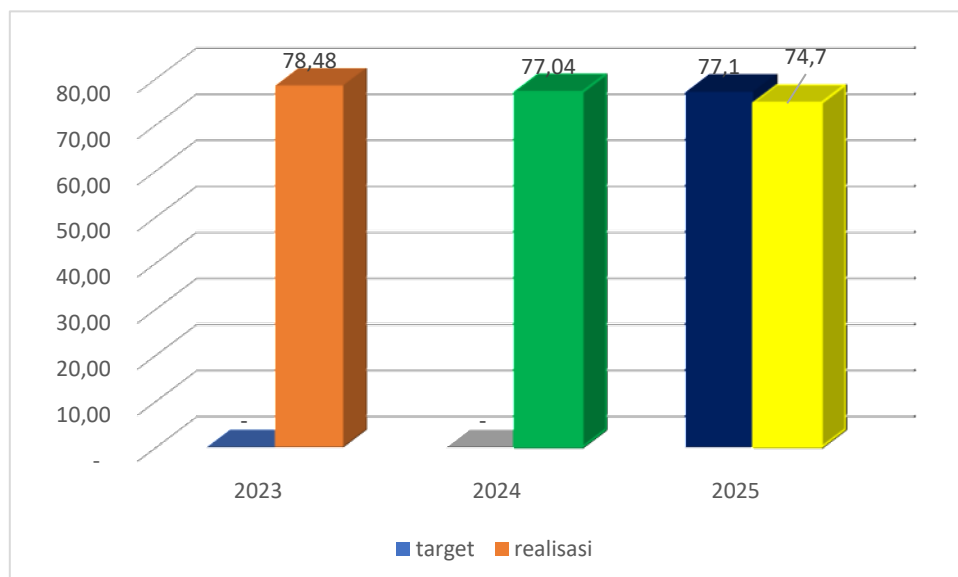
Pada sasaran Meningkatnya Akses ke Peluang Kerja dengan indikator persentase penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan yang konsisten. Tahun 2023 realisasi mencapai 71,17%, meningkat signifikan pada tahun 2024 menjadi 76,99% (naik 5,82 poin). Pada tahun 2025 kembali meningkat menjadi 77,61%,

meskipun kenaikannya relatif kecil (0,62 poin). Tren ini menunjukkan bahwa program penempatan tenaga kerja berjalan efektif dan mampu mendorong peningkatan serapan tenaga kerja di daerah.

Peningkatan tersebut didukung oleh berbagai upaya, antara lain optimalisasi pelayanan pencari kerja (AK/1), pelaksanaan job fair, pemanfaatan sistem informasi lowongan kerja berbasis digital, serta fasilitasi penempatan tenaga kerja antar daerah. Meskipun demikian, masih terdapat hambatan berupa ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri (mismatch) serta keterbatasan lapangan kerja sektor formal.

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Grafik 3.2
Capaian Realisasi Sasaran Strategis 1.2

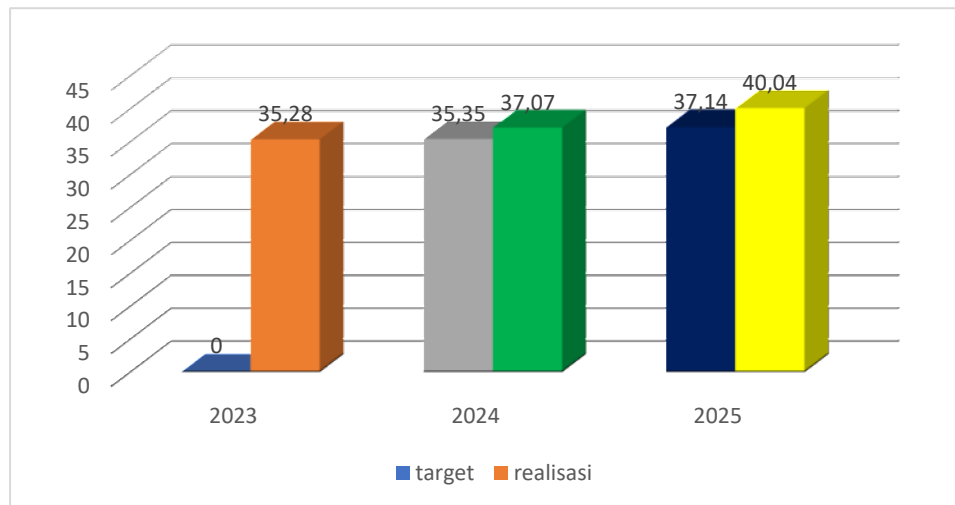


Pada sasaran Meningkatnya Akses ke Peluang Kerja dengan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2023, TPAK tercatat sebesar 78,48%, kemudian menurun pada tahun 2024 menjadi 77,04%, dan kembali menurun pada tahun 2025 menjadi 74,70% dari target 77,10% atau dengan capaian 96,89%. Dengan demikian, pada tahun 2025 indikator ini belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan TPAK antara lain melalui sosialisasi informasi pasar kerja, peningkatan akses layanan ketenagakerjaan, serta pengembangan pelatihan dan kewirausahaan. Adapun hambatan yang dihadapi dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi perekonomian, meningkatnya penduduk usia kerja yang belum terserap, serta perubahan preferensi masyarakat terhadap jenis dan pola pekerjaan.

Sasaran 2. Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja

Grafik 3.3
Capaian Realisasi Sasaran Strategis 2



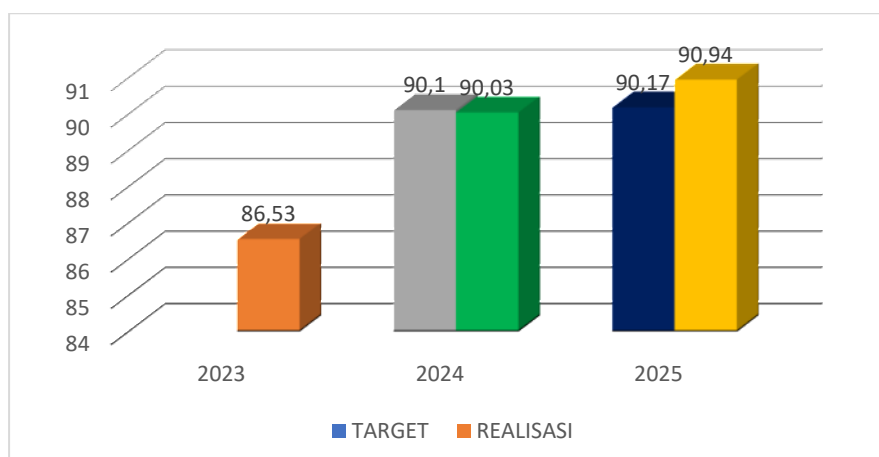
Pada sasaran Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja dengan indikator Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, produktivitas tenaga kerja tercatat sebesar 35,28 juta rupiah per tenaga kerja. Angka tersebut meningkat pada tahun 2024 menjadi 37,07 juta rupiah per tenaga kerja dengan tingkat capaian 104,87%, dan kembali meningkat pada Tahun 2025 menjadi 40,04 juta rupiah per tenaga kerja dengan capaian 107,81%.

Peningkatan produktivitas tersebut didukung oleh pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi, peningkatan sertifikasi tenaga kerja, serta penguatan sinergi dengan sektor industri. Adapun hambatan yang masih dihadapi antara lain keterbatasan anggaran pelatihan serta belum meratanya peningkatan produktivitas pada seluruh sektor usaha.

Sasaran 3. Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Tenaga Kerja

a. Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja

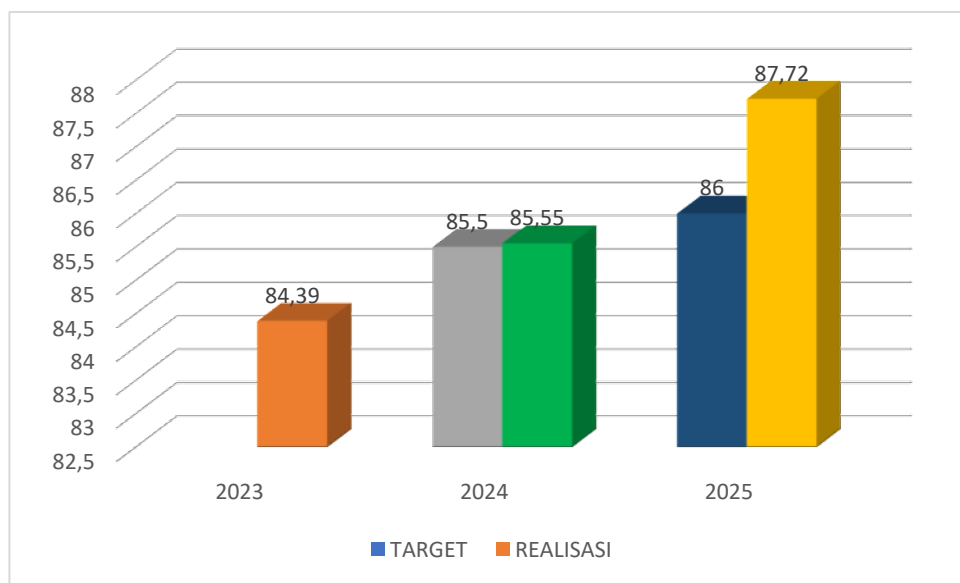
Grafik 3.4
Capaian Realisasi Sasaran Strategis 3.1



Pada sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, indicator Nilai SAKIP menunjukkan peningkatan yang konsisten dari 86,53 pada tahun 2023 menjadi 90,03 pada tahun 2024 dan meningkat lagi menjai 90,94 pada tahun 2025. Hal ini mencerminkan perbaikan tata kelola, perencanaan, serta system pemngukuran kinerja yang semakin baik. Upaya yang dilakukan meliputi penyempurnaan cascading kinerja, penguatan monitoring dan evaluasi berkala, optimalisasi pemanfaatan aplikasi e-kinerja, serta peningkatan kualitas penyusunan LKjIP berbasis data.

b. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja

Grafik 3.5
Capaian Realisasi Sasaran Strategis 3.2



Demikian pula pada sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, indicator Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan peningkatan yang konsisten dari 84,39 pada tahun 2023 menjadi 85,55 pada tahun 2024 dan meningkat lagi menjai 87,72 pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas layanan public secara berkelanjutan. Upaya yang dilakukan meliputi penyederhanaan SOP pelayanan, digitalisasi layanan ketenagakerjaan, dan peningkatan kapasitas petugas pelayanan. Hambatan yang masih dihadapi antara lain keterbatasan sarana prasarana pendukung dan meningkatnya ekspektasi Masyarakat terhadap layanan yang dan berbasis teknologi.

3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.6
Tingkat Kemajuan Capaian Kinerja dengan Akhir Tahun Rencana Strategis

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir renstra	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
	Meningkatnya Akses Ke Peluang Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	74,70%	77,35%	96,57
	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	40,04 Juta rp/tenaga kerja	37,49 Juta rp/tenaga kerja	106,80
	Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Tenaga Kerja	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja	90,94	91,60	99,28
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja	87,72	88,15	99,51

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir Rencana Strategis, secara umum capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja menunjukkan tingkat kemajuan yang baik hingga sangat baik, dengan sebagian besar indikator telah mendekati bahkan melampaui target akhir Renstra.

Realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2025 tercatat sebesar 74,70%, sedangkan target akhir Renstra ditetapkan sebesar 77,35%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2025 belum sepenuhnya mencapai target Renstra, dengan tingkat kemajuan sebesar 96,57%. Dengan demikian, masih terdapat selisih sebesar 2,65 poin untuk mencapai target mutlak Renstra serta masih terdapat kekurangan sebesar 3,43% untuk mencapai target 100%.

Realisasi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada tahun 2025 mencapai 40,04 juta rupiah per tenaga kerja, sedangkan target akhir Renstra sebesar 37,49 juta rupiah per tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2025 telah melampaui target akhir Renstra, dengan tingkat kemajuan sebesar 106,80%. Dengan demikian, capaian kinerja telah melampaui target mutlak Renstra sebesar 2,55 juta rupiah per tenaga kerja serta melebihi target 100% sebesar 6,80%.

Realisasi Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja tahun 2025 adalah 90,94 sedangkan target akhir Renstra adalah 91,60. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2025 belum mencapai target Renstra, yaitu berada di angka 99,28% atau masih terdapat selisih 0,66 poin untuk mencapai target mutlak dan masih terdapat kekurangan 0,72% untuk mencapai target 100%.

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja tahun 2025 adalah 87,72 sedangkan target akhir Renstra adalah 88,15. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2025 belum mencapai target Renstra. Capaian saat ini berada di angka 99,51% atau masih terdapat selisih 0,43 poin untuk mencapai target mutlak dan masih terdapat kekurangan 0,49% untuk mencapai target 100%.

4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, standar Provinsi atau capaian kinerja Pemerintah Daerah sekitarnya;

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian dengan Pemerintah Daerah sekitarnya
(Kabupaten Ponorogo)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional/ Provinsi/ Daerah lain (Kabupaten Ponorogo)	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
	Meningkatnya Akses Ke Peluang Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	74,70	79,91	93,48
	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	40,04	29,83	134,23
	Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Tenaga Kerja	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja	90,94	77,26	117,71
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja	87,72	99,75	87,94

Sasaran 1. Meningkatnya Akses ke Peluang Kerja

Berdasarkan data realisasi kinerja Tahun 2025 pada sasaran Meningkatnya Akses ke Peluang Kerja, indikator yang digunakan sebagai tolok ukur adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan mencatatkan nilai TPAK sebesar 74,70%, sedangkan Kabupaten Ponorogo memperoleh nilai yang lebih tinggi yaitu 79,91%. Dengan persentase capaian sebesar 93,48% terhadap pembandingan, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Magetan masih berada di bawah Kabupaten Ponorogo.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses masyarakat Kabupaten Magetan terhadap peluang kerja masih perlu ditingkatkan, baik melalui perluasan kesempatan kerja formal, peningkatan kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia

industri, maupun optimalisasi layanan ketenagakerjaan. Perbedaan capaian ini juga mencerminkan adanya dinamika struktur ekonomi dan pasar kerja yang berbeda antara kedua daerah.

Sasaran 2. Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja

Pada sasaran Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja, indikator Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja menunjukkan kinerja yang sangat baik. Kabupaten Magetan pada Tahun 2025 mencatatkan produktivitas tenaga kerja sebesar 40,04 juta rupiah per tenaga kerja, jauh lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Ponorogo yang mencapai 29,83 juta rupiah per tenaga kerja. Dengan persentase capaian sebesar 134,23% terhadap pembanding, hal ini menunjukkan bahwa tingkat produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Magetan secara signifikan lebih unggul dibandingkan Kabupaten Ponorogo.

Capaian tersebut mengindikasikan bahwa tenaga kerja di Kabupaten Magetan memiliki kontribusi output yang lebih tinggi, yang didukung oleh peningkatan kompetensi, efektivitas pelatihan kerja, serta peran sektor-sektor produktif yang memberikan nilai tambah ekonomi lebih besar. Keunggulan ini menjadi modal penting dalam mendukung daya saing daerah serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

Sasaran 3. Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Tenaga Kerja

Pada sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Tenaga Kerja, terdapat dua indikator yang menjadi tolok ukur, yaitu Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja.

Pada indikator Nilai SAKIP, Kabupaten Magetan memperoleh nilai sebesar 90,94, lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Ponorogo yang memperoleh nilai 77,26. Dengan capaian sebesar 117,71% terhadap pembanding, hal ini menunjukkan bahwa kinerja akuntabilitas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan lebih unggul dibandingkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo. Nilai tersebut mencerminkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kabupaten Magetan telah berjalan sangat baik, baik dari sisi perencanaan, pengukuran, pelaporan, maupun evaluasi kinerja.

Sementara itu, pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan memperoleh nilai 87,72 sedangkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo mencapai nilai lebih tinggi yaitu 99,75. Dengan persentase capaian sebesar 87,94%, dapat disimpulkan bahwa Tingkat kepuasan Masyarakat Disnaker Kabupaten Magetan masih berada di bawah Kabupaten Ponorogo. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun akuntabilitas kinerja sudah sangat baik, peningkatan kualitas pelayanan public

secara langsung kepada Masyarakat masih perlu menjadi perhatian untuk dapat menyamai atau melampaui capaian Disnaker Kabupaten Ponorogo.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan:

Tabel 3.8
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Meningkatnya Akses Ke Peluang Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	77,10%	74,70%	96,89	Belum tercapainya target dipengaruhi oleh: 1. Keterbatasan penyerapan tenaga kerja formal 2. Ketidaksiesuaian kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri 3. Perubahan preferensi masyarakat terhadap pola pekerjaan
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	35,42 Juta rp/tenaga kerja	40,04 Juta rp/tenaga kerja	107,81	Keberhasilan dipengaruhi oleh: 1. Efektivitas pelatihan berbasis kompetensi 2. Peningkatan kualitas tenaga kerja 3. Adanya dukungan sektor produktif
Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Tenaga Kerja	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja	90,17	90,94	100,85	Keberhasilan dipengaruhi oleh: 1. Peningkatan kualitas perencanaan, monitoring, dan pelaporan kinerja
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja	86	87,72	102	Keberhasilan dipengaruhi oleh: 1. Peningkatan kualitas dan kecepatan pelayanan 2. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dalam memberikan pelayanan

Dalam pelaksanaan kinerja untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan tentunya tidak lepas dari adanya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja organisasi. Hasil analisis mengenai penyebab keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja dari tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatkan Akses Ke Peluang Kerja dengan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) ditargetkan sebesar 77,10% dan terealisasi sebesar 74,70% atau mencapai 96,89% dari target. Capaian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat usia kerja dalam aktivitas ekonomi berada pada kategori baik dan relatif stabil, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa akses terhadap peluang kerja telah terbuka, namun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi capaian ini antara lain:
 - Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja pada sektor formal
 - Ketidakesesuaian kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industry
 - Perubahan preferensi masyarakat terhadap pola dan jenis pekerjaan

2. Sasaran “Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja” dengan indikator Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja ditargetkan sebesar 35,42 juta rupiah per tenaga kerja, dengan realisasi mencapai 40,04 juta rupiah per tenaga kerja, sehingga capaian kinerja sebesar 107,81%. Capaian ini menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja mengalami peningkatan yang signifikan dan telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan efisiensi dan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh:
 - Efektivitas pelatihan berbasis kompetensi,
 - Peningkatan kualitas tenaga kerja,
 - Pertumbuhan sektor produktif.

3. Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja”, secara umum telah menunjukkan hasil yang sangat signifikan. Hal ini tercermin dari 2 (dua) indikator utama yang melampaui target yang telah ditetapkan.
 - a. Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja
Indikator Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja ditargetkan sebesar 90,17 dan terealisasi sebesar 90,94 atau mencapai 100,85%. Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah berjalan efektif dan konsisten. Keberhasilan tersebut didukung oleh:

- Adanya sinkronisasi sinkronisasi yang baik antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan
- Peningkatan kualitas monitoring evaluasi dengan melaksanakan monev secara berjenjang dan berkala (triwulanan)

b. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Tenaga Kerja ditargetkan sebesar 86 dan terealisasi sebesar 87,72 atau mencapai 102% dari target. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat semakin baik dan mendapatkan respons positif.

Keberhasilan tersebut didukung oleh:

- Peningkatan kualitas dan kecepatan pelayanan
- Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dalam memberikan pelayanan

Pencapaian yang telah dilakukan tidak lepas dari permasalahan yang muncul dalam proses pencapaian kinerja. Permasalahan yang muncul tersebut sesegera mungkin diselesaikan dengan melakukan alternatif penyelesaian masalah agar tidak berdampak pada pencapaian target kinerja. Alternatif solusi kebijakan yang telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pencapaian kinerja, pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Permasalahan pencapaian kinerja dan Alternatif solusi kebijakan yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Permasalahan dalam pencapaian Indikator Kinerja	Alternatif Solusi
Meningkatnya Akses Ke Peluang Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	1. Keterbatasan lapangan kerja formal 2. Ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri	1. Perluasan informasi lowongan kerja berbasis digital 2. Pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja 3. Penguatan kerja sama dengan dunia usaha dan industri
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	1. Kompetensi tenaga kerja belum optimal	1. Peningkatan kualitas pelatihan kerja berbasis klaster kompetensi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Permasalahan dalam pencapaian Indikator Kinerja	Alternatif Solusi
Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Tenaga Kerja	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> Hambatan komunikasi dan sinkronisasi bukti dukung kinerja antar bidang yang mengakibatkan keterlambatan pelaporan Belum meratanya pemahaman pegawai mengenai substansi manajemen kinerja 	<ol style="list-style-type: none"> Pendampingan intensif tiap unit kerja dan rapat koordinasi rutin lintas fungsi untuk penyesuaian data Implementasi system monitoring dan sosialisasi berkelanjutan mengenai budaya kerja berbasis kinerja
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> Keterbatasan sarana dan prasarana layanan Ekspektasi masyarakat terhadap layanan cepat dan transparan 	<ol style="list-style-type: none"> Penguatan sarana dan prasarana layanan Penyederhanaan SOP pelayanan Peningkatan kapasitas petugas pelayanan

Dalam mencapai target kinerja sasaran yang telah ditetapkan terdapat beberapa permasalahan dan alternatif solusi agar tidak menghambat pencapaian kinerja. Sesuai tabel di atas permasalahan dan alternatif solusi yang diambil dalam pencapaian target kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Akses ke Peluang Kerja

Dalam upaya meningkatkan partisipasi angkatan kerja, masih terdapat beberapa kendala, antara lain keterbatasan lapangan kerja formal serta ketidaksesuaian kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan industri. Kondisi ini menyebabkan belum optimalnya penyerapan tenaga kerja dan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat usia kerja dalam kegiatan ekonomi.

Sebagai langkah tindak lanjut, telah dirumuskan beberapa alternatif solusi, yaitu:

- Perluasan informasi lowongan kerja berbasis digital guna meningkatkan akses masyarakat terhadap peluang kerja.
- Pelaksanaan pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja agar kompetensi tenaga kerja lebih relevan dengan permintaan industri.
- Penguatan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan link and match antara pelatihan dan kebutuhan riil pasar kerja.

2. Sasaran Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja

Permasalahan utama dalam pencapaian indikator produktivitas tenaga kerja adalah kompetensi tenaga kerja yang belum optimal. Hal ini berdampak pada belum maksimalnya nilai tambah dan daya saing tenaga kerja di berbagai sektor.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan upaya peningkatan kualitas pelatihan kerja berbasis klaster kompetensi. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan keterampilan teknis dan profesional tenaga kerja sehingga produktivitas dapat terus meningkat secara berkelanjutan

3. Pada sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dengan indikator pertama yaitu **Nilai SAKIP** Dinas Tenaga Kerja terdapat permasalahan yaitu adanya hambatan komunikasi dan sinkronisasi bukti dukung kinerja antar bidang yang mengakibatkan keterlambatan pelaporan dan belum meratanya pemahaman pegawai mengenai substansi manajemen kinerja. Untuk menyikapi permasalahan tersebut dicari alternatif penyelesaian yaitu melakukan pendampingan intensif tiap unit kerja dan rapat koordinasi rutin lintas fungsi untuk penyelarasan data dan Implementasi system monitoring dan sosialisasi berkelanjutan mengenai budaya kerja berbasis kinerja. Sedangkan untuk indikator kedua **Indeks Kepuasan Masyarakat** Dinas Tenaga Kerja tidak terdapat permasalahan sehingga kinerja dapat berjalan dengan baik dan melebihi target yang telah ditetapkan, namun terdapat alternatif solusi kebijakan untuk memastikan target kinerja dapat tercapai yaitu melakukan survei harian secara digital tepat setelah masyarakat menerima layanan untuk mengetahui titik lemah pelayanan secara spesifik.

B. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2025

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Efisiensi Kinerja Sasaran
Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
Meningkatnya Akses Ke Peluang Kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja	77,10%	74,70%	96,89	529.898.900	414.690.730	78,26	22,52
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	37,14 Juta rp/tenaga kerja	40,04 Juta rp/tenaga kerja	107,81	1.803.950.780	1.752.275.840	97,14	2,86

Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Tenaga Kerja	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja	90,17 Skor	90,94 Skor	100,85	3.410.386.503	3.222.035.483	94,48	6,46
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja	86 Skor	87,72 Skor	102				
Efisiensi total				101,89				6,82

Berdasarkan tabel 3.9 diatas, efisiensi kinerja dihitung dengan menggunakan rumus sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 dan hasilnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran kinerja meningkatnya akses ke peluang kerja mempunyai capaian kinerja sebesar 96,86% dan persentase penyerapan anggaran sebesar 78,26%, sehingga dapat diketahui Tingkat efisiensinya adalah 22,52%.
2. Sasaran kinerja meningkatnya produktivitas tenaga kerja mempunyai capaian kinerja sebesar 107,81% dan persentase penyerapan anggaran sebesar 97,14%, sehingga dapat diketahui Tingkat efisiensinya adalah 2,86%.
3. Sasaran kinerja Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Tenaga Kerja pada indikator Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja mempunyai capaian kinerja sebesar 100,85% dan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja sebesar 102%, sedangkan persentase penyerapan anggaran sebesar 94,48% sehingga dapat diketahui Tingkat efisiensinya adalah 6,46%.

Secara keseluruhan, total capaian kinerja organisasi mencapai 101,89%, yang berarti target kinerja secara agregat telah melampaui target yang ditetapkan. Sementara itu, total tingkat efisiensi sebesar 6,82%, menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah dilaksanakan secara cukup efisien dengan hasil kinerja yang optimal.

C. INOVASI TAHUN 2025

Selama Tahun 2025, inovasi yang telah dilakukan/dibuat oleh Dinas Tenaga Kerja antara lain:

1. PULPEN ULD (Pusat Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Unit Disabilitas)



PULPEN ULD (Pusat Layanan Penempatan Tenaga Kerja dan Unit Layanan Disabilitas) adalah inovasi Disnaker Magetan yang menyediakan layanan penempatan secara terintegrasi bagi seluruh pencari kerja, termasuk penyandang disabilitas. Melalui unit ini, masyarakat dapat memperoleh informasi lowongan pekerjaan, konsultasi kerja, pendampingan hingga fasilitas penyaluran ke Perusahaan. PULPEN ULD juga memberikan dukungan khusus bagi penyandang disabilitas agar memiliki akses dan kesempatan kerja yang setara, sejalan dengan prinsip pelayanan public yang inklusif dan nondiskriminatif.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Tahun 2025 ini dapat menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai, yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja baik kinerja sasaran, kinerja program, maupun kinerja kegiatan.

A. SIMPULAN

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan telah menetapkan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerjanya di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dalam rangka mendukung Visi dan Misi Bupati Magetan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 yang kemudian diturunkan ke dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang didalamnya menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Pada tahun 2025, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 1 (satu) tujuan, 3 (tiga) sasaran dengan menggunakan 4 (empat) indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dari 4 (empat) indikator kinerja yang diukur, hasilnya adalah sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya Akses ke Peluang Kerja

- Sasaran ke-1 Meningkatnya Akses ke Peluang Kerja terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 96,89 % (kategori berhasil);
- Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja belum mencapai target;
- Sasaran ke-1 didukung oleh 2 (dua) Program yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori berhasil)
- Sasaran ke-1 didukung oleh 5 (lima) kegiatan terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 115,744 % (kategori sangat berhasil)

Sasaran 2: Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja

- Sasaran ke-2 Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 107,81% (kategori sangat berhasil);
- Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja telah melampaui target;

- Sasaran ke-2 didukung oleh 2 (dua) program yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori berhasil)
- Sasaran ke-2 didukung oleh 5 (lima) kegiatan terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori berhasil)

Sasaran 3: Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Tenaga Kerja

- Sasaran ke-3 Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Tenaga Kerja terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 101,43% (kategori sangat berhasil);
- Sebanyak 2 (dua) indikator kinerja telah mencapai target seluruh indikator kinerja telah melampaui target;
- Sasaran ke-3 didukung oleh 1 (satu) Program yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 104,61 % (kategori sangat berhasil)
- Sasaran ke-3 didukung oleh 6 (enam) kegiatan terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100,90% (kategori sangat berhasil)

Tabel 4.1
Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan
Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja % (%)
Meningkatnya Akses Ke Peluang Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	77,10%	74,70%	96,89
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	35,42 Juta rp/tenaga kerja	40,04 Juta rp/tenaga kerja	107,81
Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Tenaga Kerja	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja	90,17 Skor	90,94 Skor	100,85
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja	86 Skor	87,72 Skor	102
Capaian Kinerja				101,89
				SANGAT BAIK

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja 3 (tiga) sasaran tersebut, secara umum telah melampaui target capaian kinerja dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 101,89% dengan serapan anggaran sebesar Rp. 5.389.002.053 dan mencapai efisiensi kinerja sebesar 6,18%.

Capaian kinerja rata-rata tahun 2025 ini naik jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 0,01%. Kenaikan rata-rata capaian kinerja Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024 secara umum dipengaruhi oleh peningkatan efektivitas perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan program sehingga capaian kinerja dapat dipertahankan pada kategori sangat baik.

Serapan anggaran tahun 2025 ini naik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,02%. Penyebab utama permasalahan ini adalah pelaksanaan kegiatan yang lebih terjadwal, percepatan proses administrasi, serta peningkatan koordinasi antarunit kerja.

B. RENCANA AKSI TAHUN 2026

Atas dasar pencapaian kinerja tahun 2025 tersebut, rencana aksi yang akan dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya antara lain:

Tabel 4.2
Rencana Aksi Peningkatan Kinerja
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan
Tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana Aksi Tahun 2026
Meningkatnya Akses ke Peluang Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Job Fair 2. Optimalisasi Layanan AntarKerja (IPK) 3. Penyelenggaraan pelatihan berbasis Masyarakat 4. Sinergi dengan SMK/Lembaga Pendidikan terkait fasilitasi penempatan kerja bagi lulusan baru melalui kerjasama dengan Bursa Kerja Khusus (BKK) 5. Penempatan transmigrasi
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) 2. Sertifikasi Kompetensi (BNSP) 3. Bimtek peningkatan produktivitas Perusahaan 4. Bimtek dan pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) 5. Program pemagangan industri 6. Pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial 7. Pemberian bantuan jaminan social tenaga kerja bagi buruh tani dan pekerja rentan

Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana Aksi Tahun 2026
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	1. Reviu kinerja berkala 2. Sinkronisasi data perencanaan 3. Penguatan budaya kerja akuntabel
Dinas Tenaga Kerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat

Atas rencana aksi tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan menyusun target waktu pencapaian indikator kinerja sasaran Tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Target Waktu Pencapaian Indikator Kinerja
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan
Tahun 2026

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2026				
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TOTAL
SASARAN I	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja				77,15%	77,15%
SASARAN II	Tingkat produktivitas tenaga kerja				37,21 Juta rp/tenaga kerja	37,21 Juta rp/tenaga kerja
SASARAN III	Nilai SAKIP				91 Nilai	91 Nilai
	Indeks Kepuasan Masyarakat				87,75 Skor	87,75 Skor

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan kepada pihak-pihak terkait baik para *stakeholders* maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Magetan. Harapan kami, dari hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan ini dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Magetan, 3 Maret 2026

KEPONTAAN KABUPATEN MAGETAN
DINAS TENAGA KERJA



Dr. H. ENIS RIJAWAN, MM
Penyuluh Utama Muda (IV/c)
NIP. 196605161986031005

LAMPIRAN

A. Matriks Renstra RPD dan RPJMD

1. Matriks Renstra RPD

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Baselin e (2022)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
										2024		2025		2026				
										TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET
Sebelum Perubahan																		
Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada urusan tenaga kerja dan transmigrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada urusan tenaga kerja dan transmigrasi	2	0				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan ASN Disnaker terhadap Layanan Kesekretariatan Disnaker Indeks		80	2.213.928.978	81	2.213.928.978	82	2.213.928.978	82	6.641.786.934	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu Dokumen		21	55.000.000	21	55.000.000	21	55.000.000	63	165.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen		13	25.000.000	13	25.000.000	13	25.000.000	39	75.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan		8	30.000.000	8	30.000.000	8	30.000.000	24	90.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah %		88	1.460.428.978	89	1.460.428.978	90	1.460.428.978	90	4.381.286.934	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang		21	1.455.428.978	19	1.455.428.978	18	1.455.428.978	58	4.366.286.934	Dinas Tenaga Kerja

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Baselin e (2022)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										2024		2025		2026				
										TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
		2	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Laporan		61	5.000.000	61	5.000.000	61	5.000.000	183	15.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur Orang		21	50.000.000	19	50.000.000	18	50.000.000	58	150.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0	5	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasar tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Orang		4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	12	60.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0	5	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan Orang		30	30.000.000	30	30.000.000	30	30.000.000	90	90.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Paket		12	189.900.000	12	189.900.000	12	189.900.000	36	569.700.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0	6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket		2	8.000.000	2	8.000.000	2	8.000.000	6	24.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0	6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket		12	33.400.000	12	33.400.000	12	33.400.000	36	100.200.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0	6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket		4	10.000.000	4	10.000.000	2	10.000.000	12	30.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0	6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket		12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	36	60.000.000	Dinas Tenaga Kerja

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Baselin e (2022)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										2024		2025		2026				
										TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
		2	0	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan Paket		10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	30	45.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen		12	13.500.000	12	13.500.000	12	13.500.000	36	40.500.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0	0	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan		12	90.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	36	270.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan		12	313.000.000	12	313.000.000	12	313.000.000	36	939.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan		12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	36	90.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan		8	15.000.000	8	15.000.000	8	15.000.000	24	45.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan		12	268.000.000	12	268.000.000	12	268.000.000	36	804.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	09	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara Unit		12	145.600.000	12	145.600.000	12	145.600.000	36	436.800.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	09	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit		2	53.100.000	2	53.100.000	2	53.100.000	6	159.300.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	09	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit		11	12.500.000	11	12.500.000	11	12.500.000	33	37.500.000	Dinas Tenaga Kerja

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Baselin e (2022)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
										2024		2025		2026				TARGET	Rp
										TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
		2	0	0	09	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit		2	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	4	210.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	0	0	09	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	30.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
Meningkatkan perluasan kesempatan kerja	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	2	0	0			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja Persen		100	82.719.970	100	132.719.970	100	82.719.970	100	298.159.910	Dinas Tenaga Kerja	
		2	0	0	2.0		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Yang Disusun Dokumen		2	82.719.970	3	132.719.970	2	82.719.970	7	298.159.910	Dinas Tenaga Kerja	
		2	0	0	2.0	0	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro Dokumen		0	0	1	82.719.970	0	0	1	82.719.970	Dinas Tenaga Kerja	
		2	0	0	2.0	0	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro Dokumen		2	82.719.970	2	50.000.000	2	82.719.970	6	215.439.940	Dinas Tenaga Kerja	
Meningkatkan perluasan kesempatan kerja	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	2	0	0			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten Persen		80	380.000.000	80	380.000.000	80	380.000.000	80	1.140.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	0	0	2.0		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Persen		80	195.000.000	80	195.000.000	80	195.000.000	80	585.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	0	0	2.0	0	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja/Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Orang		16	170.000.000	16	170.000.000	16	170.000.000	48	510.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	0	0	2.0	0	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lembaga		10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	30	60.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	0	0	2.0	0	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja Unit		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	3	15.000.000	Dinas Tenaga Kerja	

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Baselin e (2022)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
										2024		2025		2026				TARGET	Rp
										TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
		2	0	0	2.0		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Terakreditasi Lembaga		7	140.000.000	7	140.000.000	8	140.000.000	22	420.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	0	0	2.0	0	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina Lembaga		8	140.000.000	8	140.000.000	8	140.000.000	24	420.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	0	0	2.0		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti Kegiatan Peningkatan dan Pengukuran Produktivitas Orang		16	45.000.000	16	45.000.000	16	45.000.000	48	135.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	0	0	2.0	0	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah Dokumen		1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	3	135.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
Meningkatkan perluasan kesempatan kerja	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	2	0	0			Program Penempatan Tenaga Kerja	Presentase Pencari Kerja yang Mendapat Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja Persen		100	461.472.325	100	461.472.325	100	461.472.325	100	1.384.416.975	Dinas Tenaga Kerja	
		2	0	0	2.0		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Fasilitas Pelayanan Antar Kerja Orang		300	155.752.675	300	155.752.675	300	155.752.675	900	467.258.025	Dinas Tenaga Kerja	
		2	0	0	2.0	0	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Luar Negeri (AKL) Orang		200	74.879.425	200	74.879.425	200	74.879.425	600	224.638.275	Dinas Tenaga Kerja	
		2	0	0	2.0	0	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Orang		30	37.873.250	30	37.873.250	30	37.873.250	90	113.619.750	Dinas Tenaga Kerja	
		2	0	0	2.0	0	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenaga Kerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD Orang		2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	6	9.000.000	Dinas Tenaga Kerja	

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Baselin e (2022)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										2024		2025		2026				
										TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
		2	0	0	2.0	0	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja Orang		6	40.000.000	6	40.000.000	6	40.000.000	18	120.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang Mendapatkan Izin, Pengawasan dan Pengendalian LPTKS Lembaga		5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	15	15.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0	0	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku Lembaga		5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	15	15.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Penyediaan Lowongan Informasi Pasar Kerja Lowongan		50	189.719.650	50	189.719.650	50	189.719.650	150	569.158.950	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0	0	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) Orang		1000	9.719.650	1000	9.719.650	1.000	9.719.650	3.000	29.158.950	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0	0	Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapat pekerjaan melalui jobfair/bursa kerja Orang		700	180.000.000	750	180.000.000	750	180.000.000	2.100	540.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Pekerja Migran (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya Orang		75	111.000.000	75	111.000.000	75	111.000.000	225	333.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0	0	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI / PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya Orang		25	76.000.000	25	76.000.000	25	76.000.000	75	228.000.000	Dinas Tenaga Kerja

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Baselin e (2022)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
										2024		2025		2026				TARGET	Rp
										TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
		2	0	0	2.0	0	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran (CPMI)	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani Orang		2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	6	15.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	0	0	2.0	0	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna yang Diberdayakan Orang	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna yang Diberdayakan Orang		10	30.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	30	90.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
Meningkatkan perluasan kesempatan kerja	Terlindunginya tenaga kerja	2	0	0			Program Hubungan Industrial	Presentase Penyelesaian Perselisihan Kasus Ketengakerjaan Persen		100	134.005.260	100	134.005.260	100	134.005.260	100	402.015.780	Dinas Tenaga Kerja	
		2	0	0	2.0		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola yang baik Perusahaan		10	15.267.550	12	15.267.550	15	15.267.550	37	45.802.650	Dinas Tenaga Kerja	
		2	0	0	2.0	0	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit dan Pekerja yang terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan Laporan		1	15.267.550	1	15.267.550	1	15.267.550	3	45.802.650	Dinas Tenaga Kerja	
		2	0	0	2.0		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kasus ketenagakerjaan secara bipartit Perkara		4	118.737.710	4	118.737.710	6	118.737.710	14	356.213.130	Dinas Tenaga Kerja	
		2	0	0	2.0	0	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah Perkara		40	52.077.400	40	52.077.400	40	52.077.400	120	156.232.200	Dinas Tenaga Kerja	

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Baselin e (2022)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										2024		2025		2026				
										TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
		2	0	0	2.0	0	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan Perkara		4	17.586.450	4	17.586.450	6	17.586.450	14	52.759.350	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0	0	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina Lembaga		1	49.073.860	1	49.073.860	1	49.073.860	3	147.221.580	Dinas Tenaga Kerja
Meningkatkan perluasan kesempatan kerja	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	3	3	2			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigran yang terseleksi dan terlatih Persen		100	160.000.000	100	160.000.000	100	160.000.000	100	480.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		3	3	0			Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah calon transmigran yang terseleksi, mendapat pelatihan dan diberangkatkan Kepala Keluarga		5	160.000.000	5	160.000.000	5	160.000.000	15	480.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Laporan		1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	3	75.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0	0	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah calon transmigran yang diberangkatkan dan menerima bantuan Kepala Keluarga		5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	15	300.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0	0	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan Kepala Keluarga		25	20.000.000	25	20.000.000	25	20.000.000	75	60.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0	0	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan Orang		5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	15	45.000.000	Dinas Tenaga Kerja
Setelah Perubahan																		

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Baselin e (2022)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
										2024		2025		2026				TARGET	Rp
										TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
Meningkatkan penyerapan dan partisipasi angkatan kerja	Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Tenaga Kerja	2	0	0			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan ASN Disnaker terhadap Layanan Kesekretariatan Disnaker Indeks		80	2.213.928.978	81	2.213.928.978	82	2.213.928.978	82	6.641.786.934	Dinas Tenaga Kerja	
		2	0	0	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu Dokumen		21	55.000.000	21	55.000.000	21	55.000.000	63	165.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	0	0	2.0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen		13	25.000.000	13	25.000.000	13	25.000.000	39	75.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	0	0	2.0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan		8	30.000.000	8	30.000.000	8	30.000.000	24	90.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	0	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah %		88	1.460.428.978	89	1.460.428.978	90	1.460.428.978	90	4.381.286.934	Dinas Tenaga Kerja	
		2	0	0	2.0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan		302	1.455.428.978	302	1.455.428.978	302	1.455.428.978	906	4.366.286.934	Dinas Tenaga Kerja	
		2	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Laporan		61	5.000.000	61	5.000.000	61	5.000.000	183	15.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	0	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur Orang		21	50.000.000	21	50.000.000	21	50.000.000	63	150.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	0	0	2.0	0	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasar tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Orang		4	20.000.000	32	20.000.000	32	20.000.000	68	60.000.000	Dinas Tenaga Kerja	

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Baselin e (2022)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB						
										2024		2025		2026				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
										TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp								
		2	0	0	2.0	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan Orang		30	30.000.000	32	30.000.000	32	30.000.000	94	90.000.000	Dinas Tenaga Kerja					
		2	0	0	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Paket		12	189.900.000	12	189.900.000	12	189.900.000	36	569.700.000	Dinas Tenaga Kerja					
		2	0	0	2.0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket		2	8.000.000	2	8.000.000	2	8.000.000	6	24.000.000	Dinas Tenaga Kerja					
		2	0	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket		12	33.400.000	12	33.400.000	12	33.400.000	36	100.200.000	Dinas Tenaga Kerja					
		2	0	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket		4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	12	30.000.000	Dinas Tenaga Kerja					
		2	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket		12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	36	60.000.000	Dinas Tenaga Kerja					
		2	0	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Paket		10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	30	45.000.000	Dinas Tenaga Kerja					
		2	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan Dokumen		12	13.500.000	12	13.500.000	12	13.500.000	36	40.500.000	Dinas Tenaga Kerja					
		2	0	0	2.0	0	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan		12	90.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	36	270.000.000	Dinas Tenaga Kerja					
		2	0	0	2.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan		12	313.000.000	12	313.000.000	12	313.000.000	36	939.000.000	Dinas Tenaga Kerja					
		2	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan		12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	36	90.000.000	Dinas Tenaga Kerja					

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Baselin e (2022)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										2024		2025		2026				
										TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
		2	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan		12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	36	45.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan		12	268.000.000	12	268.000.000	12	268.000.000	36	804.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara Unit		12	145.600.000	12	145.600.000	12	145.600.000	36	436.800.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	09	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit		2	53.100.000	2	53.100.000	2	53.100.000	6	159.300.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	09	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit		11	12.500.000	11	12.500.000	11	12.500.000	33	37.500.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	09	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit		2	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	4	210.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	09	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	30.000.000	Dinas Tenaga Kerja
Meningkatkan penyerapan dan partisipasi angkatan kerja	Meningkatnya Akses Ke Peluang Kerja	2	0	0			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja Persen		100	82.719.970	100	132.719.970	100	82.719.970	100	298.159.910	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Yang Disusun Dokumen		2	82.719.970	3	132.719.970	2	82.719.970	7	298.159.910	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0	0	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro Dokumen		0	0	1	82.719.970	0	0	1	82.719.970	Dinas Tenaga Kerja

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Baselin e (2022)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
										2024		2025		2026				TARGET	Rp
										TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
		2	0	0	2.0	0	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu Menyusun RTK Mikro Orang		20	82.719.970	10	50.000.000	20	82.719.970	50	215.439.940	Dinas Tenaga Kerja	
Meningkatkan penyerapan dan partisipasi angkatan kerja	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	2	0	0			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten Persen		80	380.000.000	80	380.000.000	80	380.000.000	80	1.140.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	0	0	2.0		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Persen		80	195.000.000	80	195.000.000	80	195.000.000	80	585.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	0	0	2.0	0	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n Orang		16	170.000.000	16	170.000.000	16	170.000.000	48	510.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	0	0	2.0	0	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n Lembaga		10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	30	60.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	0	0	2.0	0	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja Unit		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	3	15.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	0	0	2.0		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Terakreditasi Lembaga		7	140.000.000	7	140.000.000	8	140.000.000	22	420.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	0	0	2.0	0	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina Lembaga		8	140.000.000	8	140.000.000	8	140.000.000	24	420.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	0	0	2.0		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti Kegiatan Peningkatan dan Pengukuran Produktivitas Orang		16	45.000.000	16	45.000.000	16	45.000.000	48	135.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	0	0	2.0	0	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah Dokumen		1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	3	135.000.000	Dinas Tenaga Kerja	

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Baselin e (2022)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
										2024		2025		2026				TARGET	Rp
										TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
Meningkatkan penyerapan dan partisipasi angkatan kerja	Meningkatnya Akses Ke Peluang Kerja	2	0	0			Program Penempatan Tenaga Kerja	Presentase Pencari Kerja yang Mendapat Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja Persen		100	461.472.325	100	461.472.325	100	461.472.325	100	1.384.416.975	Dinas Tenaga Kerja	
		2	0	0	2.0		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Fasilitas Pelayanan Antar Kerja Orang		2.100	155.752.675	2.200	155.752.675	2.300	155.752.675	6.600	467.258.025	Dinas Tenaga Kerja	
		2	0	0	2.0	0	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Luar Negeri (AKL) Orang		2.100	74.879.425	2.200	74.879.425	2.300	74.879.425	6.600	224.638.275	Dinas Tenaga Kerja	
		2	0	0	2.0	0	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Orang		30	37.873.250	30	37.873.250	30	37.873.250	90	113.619.750	Dinas Tenaga Kerja	
		2	0	0	2.0	0	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenaga Kerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD Orang		2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	6	9.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	0	0	2.0	0	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja Orang		30	40.000.000	30	40.000.000	30	40.000.000	90	120.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	0	0	2.0		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang Mendapatkan Izin, Pengawasan dan Pengendalian LPTKS Lembaga		5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	15	15.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	0	0	2.0	0	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku Lembaga		5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	15	15.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	0	0	2.0		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Penyediaan Lowongan Informasi Pasar Kerja Lowongan		50	189.719.650	50	189.719.650	50	189.719.650	150	569.158.950	Dinas Tenaga Kerja	
		2	0	0	2.0	0	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) Orang		1000	9.719.650	1000	9.719.650	1.000	9.719.650	3.000	29.158.950	Dinas Tenaga Kerja	

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Baselin e (2022)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										2024		2025		2026				
										TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
		2	0	0	2.0	0	Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapat pekerjaan melalui jobfair/bursa kerja Orang		750	180.000.000	750	180.000.000	750	180.000.000	2.250	540.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0	4	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Pekerja Migran (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya Orang		55	111.000.000	55	111.000.000	55	111.000.000	165	333.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0	0	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI / PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya Orang		35	76.000.000	35	76.000.000	35	76.000.000	105	228.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0	0	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani Orang		2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	6	15.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0	0	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan Orang		20	30.000.000	20	30.000.000	20	30.000.000	60	90.000.000	Dinas Tenaga Kerja
Meningkatkan penyerapan dan partisipasi angkatan kerja	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	2	0	0	2.0	0	Program Hubungan Industrial	Presentase Penyelesaian Perselisihan Kasus Ketengakerjaan Persen		100	134.005.260	100	134.005.260	100	134.005.260	100	402.015.780	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0	0	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola yang baik Perusahaan		10	15.267.550	12	15.267.550	15	15.267.550	37	45.802.650	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0	0	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Indormasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan Laporan		1	15.267.550	1	15.267.550	1	15.267.550	3	45.802.650	Dinas Tenaga Kerja
		2	0	0	2.0	0	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kasus ketenagakerjaan secara bipartit Perkara		4	118.737.710	4	118.737.710	4	118.737.710	12	356.213.130	Dinas Tenaga Kerja

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Baselin e (2022)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										2024		2025		2026				
										TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
		2	0	0	2.0	0	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		40	52.077.400	40	52.077.400	40	52.077.400	120	156.232.200	Dinas Tenaga Kerja	
		2	0	0	2.0	0	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		4	17.586.450	4	17.586.450	4	17.586.450	12	52.759.350	Dinas Tenaga Kerja	
		2	0	0	2.0	0	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		1	49.073.860	1	49.073.860	1	49.073.860	3	147.221.580	Dinas Tenaga Kerja	
		2	0	0	2.0	0	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja										Dinas Tenaga Kerja	
Meningkatkan penyerapan dan partisipasi angkatan kerja	Meningkatnya Akses Ke Peluang Kerja	3	3	2			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigran yang terseleksi dan terlatih Persen	100	160.000.000	100	160.000.000	100	160.000.000	100	480.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		3	3	0			Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah calon transmigran yang terseleksi, mendapat pelatihan dan diberangkatkan Kepala Keluarga	5	160.000.000	5	160.000.000	5	160.000.000	15	480.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Laporan	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	3	75.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	0	0	2.0	0	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah calon transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan Kepala Keluarga	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	15	300.000.000	Dinas Tenaga Kerja	
		2	0	0	2.0	0	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan Kepala Keluarga	25	20.000.000	25	20.000.000	25	20.000.000	75	60.000.000	Dinas Tenaga Kerja	

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Baselin e (2022)	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
										2024		2025		2026				
										TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET
		2	0	0	2.0	0	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan Orang		5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	15	45.000.000	Dinas Tenaga Kerja

2. Matriks Renstra RPJMD

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Dinas Tenaga Kerja terhadap layanan kesekretariat an Dinas Tenaga Kerja Indeks		83,50	3.410.386.503										
OUTCOME : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui birokrasi yang profesional serta pelayanan administrasi publik yang efektif dan efisien pada Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Tenaga Kerja	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariat an skor	82,62			84,00	3.575.331.358	84,50	3.683.000.000	85,00	3.793.490.000	85,50	3.909.000.000	86,00	4.024.100.000
	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran %	97,44			97,45		97,46		97,47		97,48		97,49	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu Dokumen		21	10.920.000										
OUTPUT: Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen	21			42	28.059.150	42	35.779.000	42	37.000.000	42	72.000.000	42	73.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
Output: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen	13	13	3.990.000	11	13.059.150	11	15.779.000	11	16.000.000	11	50.000.000	11	50.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Output: Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan	8	8	6.930.000	31	15.000.000	31	20.000.000	31	21.000.000	31	22.000.000	31	23.000.000

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase serapan anggaran perangkat daerah %		89	2.872.674.453										
Output: Terpenuhinya layanan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Deviasi Serapan Anggaran Perangkat Daerah %	6,20			6,19	2.994.472.208	6,18	3.069.217.000	6,17	3.160.990.000	6,16	3.256.587.000	6,15	3.359.100.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
Output: Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan	302	308	2.871.384.153	308	2.991.472.208	406	3.066.217.000	406	3.157.900.000	406	3.253.087.000	406	3.351.600.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD														
Output: Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	61	61	1.290.300	13	3.000.000	13	3.000.000	13	3.090.000	13	3.500.000	13	7.500.000

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan													
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														
Output: Terkelolanya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik daerah yang di kelola Laporan	-		-		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
Output: Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan	-		-		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang menerima pelayanan kepegawaian sesuai prosedur		32	36.317.350										
Output: Terpenuhinya layanan kepegawaian perangkat	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian	30		35	31.250.000	35	32.187.500	35	35.000.000	35	37.000.000	35	38.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	sesuai Prosedur Orang													
Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasar tugas dan fungsi			32											
Output: Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang	2		4	5.000.000	4	5.150.000	4	6.000.000	4	7.000.000	4	8.000.000	
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan														
Output: Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan Orang	30	32	35	26.250.000	35	10.000.000	35	10.000.000	35	10.000.000	35	10.000.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
Output: Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	-		0	0	35	17.037.500	35	19.000.000	35	20.000.000	35	20.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Perundang-Undangan Orang													
Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Output: Terpenuhinya layanan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Paket	12	12	138.614.500	12	160.250.000	12	164.007.500	12	175.500.000	12	160.913.000	12	170.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Output: Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket	2	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.150.000	2	6.000.000	2	6.500.000	2	7.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
Output: Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	12	12	55.458.600	4	34.000.000	4	35.020.000	4	36.000.000	4	21.413.000	4	30.000.000

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Disediakan Paket													
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
Output: Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket	2	2	14.708.000	8	14.500.000	8	14.935.000	8	15.000.000	8	10.000.000	8	10.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
Output: Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket	12	12	19.963.350	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
Output: Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket	6	6	7.704.550	6	15.000.000	6	15.000.000	6	15.500.000	6	15.000.000	6	15.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan														
Output: Tersedianya Bahan Bacaan dan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	12	12	10.780.000	12	11.750.000	12	12.102.500	12	13.000.000	12	13.000.000	12	13.000.000

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Peraturan Perundang-undangan	Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen													
Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
Output: Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan	12	12	25.000.000	12	60.000.000	12	61.800.000	12	70.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Output: Terpenuhinya kebutuhan penunjang operasional pemerintah daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan	12	12	273.360.200	12	285.000.000	12	288.220.000	12	290.000.000	12	287.500.000	12	288.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
Output: Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	12	12	40.000.000	12	40.000.000	12	41.200.000	12	42.000.000	12	42.500.000	12	43.000.000

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATA N/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASEL INE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU
	Air dan Listrik yang Disediakan Laporan													
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
Output: Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan	8	8	10.960.100	8	11.000.000	8	11.000.000	8	11.000.000	8	11.000.000	8	11.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
Output: Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disesiakan Laporan	12	12	222.400.100	12	234.000.000	12	236.020.000	12	237.000.000	12	234.000.000	12	234.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik yang Dipelihara Unit		15	78.500.000										
Output: Ketersediaan dan keberfungsian aset daerah yang optimal untuk mendukung	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Unit	12			12	76.300.000	12	88.589.000	12	90.000.000	12	90.000.000	12	91.000.000

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
kegiatan pemerintahan														
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
Output: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit	2	2	47.000.000	2	47.000.000	2	48.410.000	2	49.000.000	2	49.000.000	2	49.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Output: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit	11	11	12.500.000	10	10.500.000	10	10.815.000	10	11.000.000	10	11.000.000	10	11.000.000

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
Output: Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi Unit	-			0	0	1	19.364.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	21.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Output: Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi Unit	1	2	19.000.000	1	18.800.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja %		100	106.606.800										
OUTCOME : Meningkatnya persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja %				100	55.000.000	100	56.650.000	100	58.350.000	100	60.000.000	100	60.000.000

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)														
Output: Tersedianya dokumen perencanaan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Yang Disusun Dokumen	1	1	106.606.800	1	55.000.000	1	56.650.000	1	58.350.000	1	60.000.000	1	60.000.000
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro														
Output: Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro Dokumen	-	1	62.389.350	-	-					1	60.000.000		
Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro														
Output: Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro Orang	20	20	44.217.450	20	55.000.000	20	56.650.000	20	58.350.000			20	60.000.000
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten %		100	1.178.523.650										
OUTCOME : Meningkatnya persentase peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi	Persentase peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi %				100	605.000.000	100	623.150.000	100	641.845.000	100	661.100.000	100	680.933.000

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi %		100	1.132.742.400										
Output: Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi Orang				20	544.000.000	20	560.320.000	30	577.132.000	30	594.445.000	40	612.278.000
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														
Output: Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n Orang	176	280	1.122.577.400	120	530.000.000	120	545.900.000	140	562.277.000	140	579.148.000	160	596.522.000
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Output: Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n Lembaga	12	10	6.165.000	6	9.000.000	6	9.270.000	7	9.550.000	7	9.834.000	8	10.129.000
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja														
Output: Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja Unit	1	2	4.000.000	1	5.000.000	1	5.150.000	1	5.305.000	1	5.463.000	1	5.627.000
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta														
Output: Terlaksananya pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Terakreditasi Lembaga	7	7	25.825.600	7	35.000.000	8	36.050.000	8	37.131.000	8	38.245.000	9	39.392.000
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Output: Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina Lemb aga	12	20	25.825.600	20	35.000.000	20	36.050.000	20	37.131.000	20	38.245.000	20	39.392.000
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
Output: Tersedianya dokumen hasil pengukuran produktivitas tenaga kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti Kegiatan Peningkatan dan Pengukuran Produktivitas Orang	20	30	19.955.650	20	26.000.000	20	26.780.000	20	27.582.000	20	28.410.000	20	29.263.000
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja														
Output: Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah Doku men	1	1	19.955.650	1	26.000.000	1	26.780.000	1	27.582.000	1	28.410.000	1	29.263.000

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja Persen		100	423.292.100										
OUTCOME: Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri dan luar negeri %	76,99			78,00	412.300.000	78,50	424.669.000	79,00	437.410.000	79,50	450.532.000	80,00	464.048.000
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Fasilitas Pelayanan Antar Kerja Orang		1500	177.625.400										
Output: Terlaksananya pelayanan antar kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Pelayanan Antar Kerja Orang	3560			2500	142.500.000	2520	146.274.000	2530	150.995.000	2540	154.500.000	2550	160.000.000
Pelayanan Antar Kerja														
Output: Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD	2741	1500	34.562.950	1500	44.500.000	1510	45.000.000	1515	46.000.000	1520	47.000.000	1525	48.000.000

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	dan AKL Orang													
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja														
Output: Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Ora ng	30	60	19.535.350	200	28.000.000	200	29.000.000	200	30.995.000	200	32.000.000	200	34.000.000
Perluasan Kesempatan Kerja														
Output: Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja Orang	30	65	123.527.100	30	70.000.000	30	72.274.000	30	74.000.000	30	75.500.000	30	78.000.000
Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS yang Mendapatkan Izin, Pengawasan dan Pengendalian		5	1.000.000										

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	LPTKS Lembaga													
Output: Terlaksananya monitoring dan pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang dilakukan monitoring dan pembinaan Lembaga	5			5	2.800.000	5	3.000.000	5	3.000.000	5	3.500.000	5	3.500.000
Pengawasan dan Pengendalian LPTKS														
Output: Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku Lem baga	5	5	1.000.000	5	2.800.000	5	3.000.000	5	3.000.000	5	3.500.000	5	3.500.000
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja														
Output: Tersedianya lowongan kerja	Jumlah Penyediaan Lowongan Informasi Pasar Kerja Lowongan	407	500	192.814.000	2000	196.500.000	2010	202.395.000	2020	208.415.000	2030	214.786.000	2040	220.638.000

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														
Output: Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) Orang	1221	2500	1.592.000	2500	1.500.000	2510	1.545.000	2520	1.600.000	2530	1.786.000	2540	2.000.000
Job Fair /Bursa Kerja														
Output: Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja Orang	536	750	191.222.000	700	195.000.000	700	200.850.000	700	206.815.000	700	213.000.000	700	218.638.000
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Pekerja Migran (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya Orang		25	51.852.700										

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Output: Terlaksananya pelatihan dan perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan)	Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang Mendapatkan Pelatihan dan Pelindungan Orang	45			80	70.500.000	80	73.000.000	80	75.000.000	80	77.746.000	80	79.910.000
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)														
Output: Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI / PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya Orang	25	25	22.852.700	60	36.000.000	60	37.000.000	60	38.000.000	60	39.500.000	60	40.518.000
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna Penempatan														
Output: Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan Orang	20	20	29.000.000	20	34.500.000	20	36.000.000	20	37.000.000	20	38.246.000	20	39.392.000
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penyelesaian Perselisihan Kasus Ketenagakerjaan %		100	625.427.130										

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
OUTCOME: Meningkatnya persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) %	39,13			40	365.000.000	45	375.950.000	45	387.230.000	50	398.847.000	50	410.812.000
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata Kelola yang baik Perusahaan		5	1.088.400										
Output: Terlaksananya pengesahan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Sama yang didaftarkan	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan dan Perjanjian Kerja Bersama yang didaftarkan Dokumen	9			11	5.000.000	12	5.000.000	13	5.000.000	14	5.000.000	15	5.000.000
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Tenaga Kerja serta Pengupahan														
Output: Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan Laporan	1	1	1.088.400	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota														
Output: Terlaksananya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Jumlah penyelesaian kasus ketenagakerjaan secara bipartit Perkar	1	4	624.338.730	4	360.000.000	4	370.950.000	4	382.230.000	4	393.847.000	4	405.812.000

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
Output: Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah Perkara	40	40	40.677.250	40	33.000.000	40	33.000.000	40	35.000.000	40	37.000.000	40	39.000.000
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
Output: Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan Perkara	1	4	5.298.450	4	7.000.000	4	4.950.000	4	4.950.000	4	4.950.000	4	4.950.000

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota														
Output: Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina Lembaga	1	1	36.068.550	1	70.000.000	1	63.000.000	1	52.280.000	1	41.897.000	1	31.862.000
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														
Output: Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Orang	1192	12344	542.294.480	2440	250.000.000	2.640	270.000.000	2.840	290.000.000	3.040	310.000.000	3.060	330.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI														
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Penempatan Transmigran yang Terseleksi dan Terlatih Person		0	0										

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
OUTCOME: Meningkatnya Persentase transmigran yang ditempatkan	Persentase Transmigran yang ditempatkan Persen	100			100	65.000.000	100	66.950.000	100	68.960.000	100	71.000.000	100	73.130.000
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Transmigran yang Terseleksi, Mendapatkan Pelatihan, dan Diberangkatkan KK		0	0										
Output: Terlaksananya Penempatan Transmigrasi yang Berkompeten	Jumlah Penempatan Transmigrasi yang Berkompeten KK	1			2	65.000.000	2	66.950.000	2	68.960.000	2	71.000.000	2	73.130.000
Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
Output: Terlaksananya Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan KK	1	0	0	2	65.000.000	2	66.950.000	2	68.960.000	2	71.000.000	2	73.130.000
TOTAL						5.077.631.358		5.230.369.000		5.387.285.000		5.550.479.000		5.713.023.000

B. Indikator Kinerja Utama RPD dan RPJMD

1. Indikator Kinerja Utama RPD

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2024 - 2026**

INSTANSI : **DINAS TENAGA KERJA**
VISI : -
MISI : -
TUGAS : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang diberikan kepada kabupaten di bidang ketenagakerjaan, bidang transmigrasi dan tugas pembantuan
FUNGSI :
1. perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Crop
Background Removal +
Enhancer +
Picture to PDF +
v

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL/FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Akses Ke Peluang Kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja	<p>Pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan baik di dalam atau luar negeri (Perpres No. 36 Tahun 2020)</p> <p>Pencari kerja yang ditempatkan adalah pencari kerja yang diterima bekerja oleh pemberi kerja</p> <p>Pencari kerja terdaftar adalah pencari kerja yang mendaftarkan dan tercatat pada dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani bidang ketenagakerjaan</p> $\frac{\sum \text{pencari kerja yang ditempatkan}}{\sum \text{pencari kerja yang terdaftar}} \times 100$	Bidang Pelatihan Kerja Dan Penempatan Tenaga Kerja	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kepala Bidang Pelatihan Kerja Dan Penempatan Tenaga Kerja
2.	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar	Bidang Pelatihan Kerja Dan Penempatan Tenaga Kerja	Kepala Dinas Tenaga Kerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL/FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<p>Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.</p> $\frac{\text{PDRB tahun berjalan atas dasar harga konstan}}{\Sigma \text{tenaga kerja}}$	Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja Dan Transmigrasi	<p>Kepala Bidang Pelatihan Kerja Dan Penempatan Tenaga Kerja</p> <p>Kepala Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja Dan Transmigrasi</p>

Magetan,

2024

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MAGETAN



Drs. ARIEF RIDWAN, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 198603 1 005

2. Indikator Kinerja Utama RPJMD

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 - 2029

INSTANSI	: DINAS TENAGA KERJA
VISI	: MAGETAN NYAMAN, MAJU DAN BERKELANJUTAN
MISI	: 1. SDM ANDAL - Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Andal dan Berdaya Saing Kuat 3. BIROKRASI TANGGAP - Membangun Birokrasi Pemerintahan yang profesional, responsive, adaptif, dan transparan 4. MASYARAKAT SEJAHTERA - Meningkatnya Kesejahteraan dengan pengentasan Kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial dan pembangunan wilayah perdesaaan 5. EKONOMI KUAT - Peningkatan daya Tarik investasi, ekonomi kreatif, pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan menumbuhkan kewirausahaan untuk mengurangi pengangguran
TUGAS	: Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang diberikan kepada kabupaten di bidang ketenagakerjaan, bidang transmigrasi dan tugas pembantuan
FUNGSI	: 1. perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; 2. pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; 4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; dan 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN /DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya akses ke peluang kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	$TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$ <p>Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas</p> <p>Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran</p>	Badan Pusat Statistik (BPS)	Kepala Dinas Tenaga Kerja
2.	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	<p>Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja =</p> $\frac{\text{PDRB tahun berjalan atas dasar harga konstan}}{\sum \text{Jumlah Tenaga Kerja}}$ <p>PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar</p>	Badan Pusat Statistik (BPS)	Kepala Dinas Tenaga Kerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN /DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.		
3.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Tenaga Kerja	Nilai SAKIP	<p>Nilai SAKIP =</p> <ul style="list-style-type: none"> - bobot 30 komponen perencanaan - bobot 30 komponen pengukuran kinerja - bobot 15 komponen pelaporan kinerja - bobot 25 komponen evaluasi <p>Komponen perencanaan, yang dinilai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, 	Inspektorat Daerah	Kepala Dinas Tenaga Kerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN /DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<p>serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)</p> <p>3. perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan</p> <p>Komponen pengukuran, yang dinilai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>reward dan punishment</i>, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. 		

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN /DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<p>Komponen pelaporan, yang dinilai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaporan kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian IKU dengan Analisa yang lengkap 3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan 4. Memuat rencana aksi tahun berikutnya <p>Komponen evaluasi, yang dinilai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE tindaklanjut 5. Menyusun rencana aksi atas tindaklanjut LHE 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya 		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	$\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25$	Laporan IKM Dinas Tenaga Kerja	Kepala Dinas Tenaga Kerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN /DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			9 parameter IKM: 1. Persyaratan 2. System mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan prasarana		

KEPERINTAH KABUPATEN TENAGA KERJA
 KABUPATEN SUMBAWA

Drs. ARIEF RIDWAN, M.M
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 196605161986031005

C. Matriks Renja Tahun 2025 dan Perubahannya

1. Matriks Renja Tahun 2025

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS TENAGA KERJA KAB. MAGETAN
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS TENAGA KERJA						5.140.392.028,00								0,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.064.292.028,00							0,00		
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						5.064.292.028,00							0,00		
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Kepuasan ASN Dinas Tenaga Kerja terhadap layanan kesekretariatan Dinas Tenaga Kerja</i>	-			81 Indeks	3.555.470.028,00						-	0,00		
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Diusun Tepat Waktu</i>	-			21 Dokumen	38.102.820,00			-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintahan dan Penataan Manajemen Pemerintahan	Dinas tenaga	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				13 Dokumen	20.875.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintahan dan Penataan Manajemen Pemerintahan	Dinas tenaga		0,00	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				8 Laporan	17.227.820,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintahan dan Penataan Manajemen Pemerintahan	Dinas tenaga		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah</i>	-			80 Persen	2.910.917.208,00			-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintahan dan Penataan Manajemen Pemerintahan	Dinas tenaga kerja	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				23 Orang/bulan	2.900.167.208,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintahan dan Penataan Manajemen Pemerintahan	Dinas tenaga kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				61 Laporan	1.750.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintah dan Penataan Manajemen Pemerintahan	Dinas tenaga kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur	-			32 Orang	39.250.000,00			-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintah dan Penataan Manajemen Pemerintahan	Dinas tenaga kerja	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				32 Orang	29.625.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintah dan Penataan Manajemen Pemerintahan	Dinas tenaga kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				32 Orang	9.625.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintahan dan Penataan Manajemen Pemerintahan	Dinas tenaga kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			12 Paket	170.375.000,00			-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintahan dan Penataan Manajemen Pemerintahan	Dinas tenaga kerja	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	5.000.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintahan dan Penataan Manajemen Pemerintahan	Dinas tenaga kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	30.875.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P6 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintah dan Penataan Manajemen Pemerintahan	Dinas tenaga kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				2 Paket	12.500.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P6 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintah dan Penataan Manajemen Pemerintahan	Dinas tenaga kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	20.000.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P6 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintah dan Penataan Manajemen Pemerintahan	Dinas tenaga kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				6 Paket	15.000.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintahan dan Penataan Manajemen Pemerintahan	Dinas tenaga kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	13.000.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintahan dan Penataan Manajemen Pemerintahan	Dinas tenaga kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	74.000.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintahan dan Penataan Manajemen Pemerintahan	Dinas tenaga kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Laporan	327.325.000,00			-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintah dan Penataan Manajemen Pemerintahan	Dinas tenaga kerja	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	40.000.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintah dan Penataan Manajemen Pemerintahan	Dinas tenaga kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Laporan	11.000.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintah dan Penataan Manajemen Pemerintahan	Dinas tenaga kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	276.325.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintahan dan Penataan Manajemen Pemerintahan	Dinas tenaga kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara</i>	-			15 Unit	69.500.000,00			-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintahan dan Penataan Manajemen Pemerintahan	Dinas tenaga kerja	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				2 Unit	47.000.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintahan dan Penataan Manajemen Pemerintahan	Dinas tenaga kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	12.500.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintah dan Penataan Manajemen Pemerintahan	Dinas tenaga kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintah dan Penataan Manajemen Pemerintahan	Dinas tenaga kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintah dan Penataan Manajemen Pemerintahan	Dinas tenaga kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
2.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja	-			100 Persen	133.750.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Yang Disusun	-			1 Dokumen	133.750.000,00			-	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi 4. Peningkatan Kualitas SDM yang Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Stakeholder terkait	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro														
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi 4. Peningkatan Kualitas SDM yang Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Stakeholder terkait		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro														
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				20 Orang	63.750.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi 4. Peningkatan Kualitas SDM yang Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Stakeholder terkait		0,00	DINAS TENAGA KERJA
3.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten	-			85 Persen	597.422.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	<i>Persentase Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi</i>	-			85 Persen	503.200.000,00			-	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi 4. Peningkatan Kualitas SDM yang Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja	Pencari kerja	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n</i>				90 Orang	483.200.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi 4. Peningkatan Kualitas SDM yang Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja	Pencari kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja														
			<i>Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n</i>				10 Lembaga	15.000.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi 4. Peningkatan Kualitas SDM yang Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja	Pencari kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja</i>				2 Unit	5.000.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi 4. Peningkatan Kualitas SDM yang Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja	Pencari kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Terakreditasi	-			7 Lembaga	66.722.000,00			-	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi 4. Peningkatan Kualitas SDM yang Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta														
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				20 Lembaga	66.722.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi 4. Peningkatan Kualitas SDM yang Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti Kegiatan Peningkatan dan Pengukuran Produktivitas	-			30 Orang	27.500.000,00			-	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi 4. Peningkatan Kualitas SDM yang Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja	Pencari kerja	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				1 Dokumen	27.500.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi 4. Peningkatan Kualitas SDM yang Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja	Pencari kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	<i>Presentase Pencari Kerja yang Mendapat Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja</i>	-			100 Persen	512.750.000,00						-	0,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Fasilitas Pelayanan Antar Kerja</i>	-			1500 Orang	228.500.000,00			-	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan memba ngun keunggulan ekonomi 4. Peningka tan Kualitas SDM yang Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja	Pencari kerja	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja														
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL</i>				1500 Orang	44.000.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan memba ngun keunggulan ekonomi 4. Peningka tan Kualitas SDM yang Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja	Pencari kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja														
			<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan</i>				30 Orang	32.000.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan memba ngun keunggulan ekonomi 2. Peningka tan Kualitas SDM Pertanian dan Pariwisata	Pencari kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja</i>				65 Orang	162.500.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi 4. Peningkatan Kualitas SDM yang Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja	Pencari kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang Mendapatkan Izin, Pengawasan dan Pengendalian LPTKS</i>	-			5 Lembaga	5.000.000,00			-	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi 4. Peningkatan Kualitas SDM yang Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja	Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.02.0002		Pengawasan dan Pengendalian LPTKS														
			<i>Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku</i>				5 Lembaga	5.000.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi 4. Peningkatan Kualitas SDM yang Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja	Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)		0,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	<i>Jumlah Penyediaan Lowongan Informasi Pasar Kerja</i>	-			50 Lowongan	200.750.000,00			-	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi 4. Peningkatan Kualitas SDM yang Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja	Pencari kerja	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.03.0002		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)</i>				2500 Orang	3.000.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi 4. Peningkatan Kualitas SDM yang Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja	Pencari kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja														
			<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja</i>				750 Orang	197.750.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi 4. Peningkatan Kualitas SDM yang Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja	Pencari kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Calon Pekerja Migran (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya</i>	-			25 Orang	78.500.000,00			-	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi 4. Peningkatan Kualitas SDM yang Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja	Purna PMI	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)														
			<i>Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya</i>				25 Orang	45.000.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi 4. Peningkatan Kualitas SDM yang Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja	Purna PMI		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah PMI Puma yang Diberdayakan</i>				20 Orang	33.500.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi 4. Peningkatan Kualitas SDM yang Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja	Puma PMI	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
5.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	<i>Presentase Penyelesaian Perselisihan Kasus Ketengakerjaan</i>	-			100 Persen	264.900.000,00						-	0,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola yang baik</i>	-			5 Perusahaan	8.500.000,00			-	P1 - Peningkatan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial 4. Peningkatan Kualitas SDM yang Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja	Pekerja dan pemberi kerja	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														
			<i>Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (FP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan</i>				1 Laporan	8.500.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P1 - Peningkatan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial 4. Peningkatan Kualitas SDM yang Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja	Pekerja dan pemberi kerja	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah penyelesaian kasus ketenagakerjaan secara bipartit</i>	-			4 Perkara	256.400.000,00			-	P1 - Peningkatan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial 4. Peningkatan Kualitas SDM yang Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja	Pekerja dan pemberi kerja	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.05.2.02.0001	Pencengahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Perselisihan yang Ditegah</i>				40 Perkara	48.000.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P1 - Peningkatan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial 4. Peningkatan Kualitas SDM yang Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja	Pekerja dan pemberi kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan</i>				4 Perkara	12.400.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P1 - Peningkatan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial 4. Peningkatan Kualitas SDM yang Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja	Pekerja dan pemberi kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah LKS Tripartit yang Dibina</i>				1 Lembaga	46.000.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P1 - Peningkatan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial 4. Peningkatan Kualitas SDM yang Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja	Pekerja dan pemberi kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														

2. Matriks Perubahan Renja Tahun 2025

Rencana Program Dan Kegiatan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
			TARGET 2025		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/(BE RKURANG)	11 = (10-9)	12	13
1	DINAS TENAGA KERJA							5.140.392.028,00	5.425.672.508,00	5.744.236.183,00	603.844.155,00		4.974.299.076,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.064.292.028,00	5.349.572.508,00	5.744.236.183,00	679.944.155,00		4.909.299.076,00
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							5.064.292.028,00	5.349.572.508,00	5.744.236.183,00	679.944.155,00		4.909.299.076,00
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Dinas Tenaga Kerja terhadap layanan kesekretariatan Dinas Tenaga Kerja	81 Indeks	83,50 Indeks	Kab. Magetan	Kab. Magetan	3.555.470.028,00	3.555.470.028,00	3.410.386.503,00	-145.083.525,00	84 Indeks		3.467.499.076,00
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	21 Dokumen	21 Dokumen	Kab. Magetan	Kab. Magetan	38.102.820,00	38.102.820,00	10.920.000,00	-27.182.820,00	42 Dokumen		35.000.000,00
2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	13 Dokumen	Kab. Magetan	Kab. Magetan	20.875.000,00	20.875.000,00	3.990.000,00	-16.885.000,00	11 Dokumen		15.000.000,00
2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	Kab. Magetan	Kab. Magetan	17.227.820,00	17.227.820,00	6.930.000,00	-10.297.820,00	31 Laporan		20.000.000,00
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	89 Persen	89 Persen	Kab. Magetan	Kab. Magetan	2.910.917.208,00	2.910.917.208,00	2.872.674.453,00	-38.242.755,00	94 Persen		2.865.322.304,00
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/b ulan	308 Orang/b ulan	Kab. Magetan	Kab. Magetan	2.909.167.208,00	2.909.167.208,00	2.871.384.153,00	-37.783.055,00	308 Orang/bulan		2.860.322.304,00
2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD												

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			TARGET 2025		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/(BE RKURANG)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10-9)	12	13
		<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	61 Laporan	61 Laporan	Kab. Magetan	Kab. Magetan	1.750.000,00	1.750.000,00	1.290.300,00	-459.700,00	13 Laporan	5.000.000,00
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur</i>	32 Orang	32 Orang	Kab. Magetan	Kab. Magetan	39.250.000,00	39.250.000,00	38.317.350,00	-2.932.650,00	35 Orang	31.250.000,00
2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasar tugas dan fungsi											
		<i>Jumlah Pegawai Berdasar Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	32 Orang	32 Orang	Kab. Magetan	Kab. Magetan	29.625.000,00	29.625.000,00	28.475.500,00	-1.149.500,00	4 Orang	5.000.000,00
2.07.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan											
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	32 Orang	32 Orang	Kab. Magetan	Kab. Magetan	9.625.000,00	9.625.000,00	7.841.850,00	-1.783.150,00	35 Orang	26.250.000,00
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	12 Paket	12 Paket	Kab. Magetan	Kab. Magetan	170.375.000,00	170.375.000,00	138.614.500,00	-31.760.500,00	12 Paket	174.295.532,00
2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket	2 Paket	Kab. Magetan	Kab. Magetan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	2 Paket	5.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
			TARGET 2025		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/(BE RKURANG)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10-9)	12	13	
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	12 Paket	Kab. Magetan	Kab. Magetan	30.875.000,00	30.875.000,00	55.468.600,00	24.583.600,00	6 Paket	46.145.532,00	
2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
		<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	2 Paket	2 Paket	Kab. Magetan	Kab. Magetan	12.500.000,00	12.500.000,00	14.708.000,00	2.208.000,00	4 Paket	14.500.000,00	
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	12 Paket	Kab. Magetan	Kab. Magetan	20.000.000,00	20.000.000,00	19.963.350,00	-36.650,00	12 Paket	20.000.000,00	
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	6 Paket	6 Paket	Kab. Magetan	Kab. Magetan	15.000.000,00	15.000.000,00	7.704.550,00	-7.295.450,00	10 Paket	15.000.000,00	
2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
		<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Magetan	Kab. Magetan	13.000.000,00	13.000.000,00	10.780.000,00	-2.220.000,00	12 Dokumen	11.750.000,00	
2.07.01.2.06.0009	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Magetan	Kab. Magetan	74.000.000,00	74.000.000,00	25.000.000,00	-49.000.000,00	12 Laporan	61.900.000,00	
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
		<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Magetan	Kab. Magetan	327.325.000,00	327.325.000,00	273.360.200,00	-53.964.800,00	12 Laporan	285.331.240,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
			TARGET 2025		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/(BE RKURANG)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10-9)	12	13	
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Magetan	Kab. Magetan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	12 Laporan	40.331.240,00	
2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	8 Laporan	8 Laporan	Kab. Magetan	Kab. Magetan	11.000.000,00	11.000.000,00	10.960.100,00	-39.900,00	12 Laporan	11.000.000	
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Magetan	Kab. Magetan	276.325.000,00	276.325.000,00	222.400.100,00	-53.924.900,00	12 Laporan	234.000.000,00	
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara</i>	15 Unit	15 Unit	Kab. Magetan	Kab. Magetan	69.500.000,00	69.500.000,00	78.500.000,00	9.000.000,00	12 unit	76.300.000,00	
2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	2 Unit	2 Unit	Kab. Magetan	Kab. Magetan	47.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	2 Unit	47.000.000	
2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	11 Unit	11 Unit	Kab. Magetan	Kab. Magetan	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	10 Unit	10.500.000,00	
2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			TARGET 2025		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/(BE RKURANG)	11 = (10-9)	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10-9)	12	13
		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	1 Unit	Kab. Magetan	Kab. Magetan	0,00	0,00	0,00	0,00	0 Unit	0
2.07.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	2 Unit			10.000.000,00	10.000.000,00	19.000.000,00	9.000.000,00	1 Unit	18.800.000,00
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja	100 Persen	100 Persen			133.750.000,00	133.750.000,00	106.606.800,00	-27.143.200,00		59.500.000,00
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	<i>Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Yang Disusun</i>	1 Dokumen	1 Dokumen			133.750.000,00	133.750.000,00	106.606.800,00	-27.143.200,00	1 Dokumen	59.500.000,00
2.07.02.2.01.0003	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro											
		<i>Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Magetan	Kab. Magetan	70.000.000,00	70.000.000,00	62.389.350,00	-7.610.650,00		
2.07.02.2.01.0003	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro											
		<i>Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro</i>	20 Orang	20 Orang	Kab. Magetan	Kab. Magetan	63.750.000,00	63.750.000,00	44.217.450,00	-19.532.550,00	20 Orang	59.500.000,00
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten	85 Persen	100 Persen			597.422.000,00	847.422.000,00	1.178.523.650,00	581.101.650,00	-	605.000.000,00
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	<i>Persentase Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi</i>	85 Persen	100 Persen			503.200.000,00	753.200.000,00	1.132.742.400,00	629.542.400,00	-	544.000.000,00
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi											

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			TARGET 2025		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/(BE RKURANG)	11 = (10-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10-9)	12	13
		<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n</i>	90 Orang	280 Orang	Kab. Magetan	Kab. Magetan	483.200.000,00	733.200.000,00	1.122.577.400,00	639.377.400,00	120 Orang	530.000.000,00
2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja											
		<i>Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n</i>	10 Lembaga	10 Lembaga	Kab. Magetan	Kab. Magetan	15.000.000,00	15.000.000,00	6.165.000,00	-8.835.000,00	8 Lembaga	9.000.000,00
2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja											
		<i>Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja</i>	2 Unit	2 Unit	Kab. Magetan	Kab. Magetan	5.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	-1.000.000,00	1 Unit	5.000.000,00
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	<i>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Terakreditasi</i>	7 Lembaga	7 Lembaga			66.722.000,00	66.722.000,00	25.825.600,00	-40.896.400,00	7 Lembaga	35.000.000,00
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta											
		<i>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina</i>	20 Lembaga	20 Lembaga	Kab. Magetan	Kab. Magetan	66.722.000,00	66.722.000,00	25.825.600,00	-40.896.400,00	20 Lembaga	35.000.000,00
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti Kegiatan Peningkatan dan Pengukuran Produktivitas</i>	30 Orang	30 Orang			27.500.000,00	27.500.000,00	19.955.650,00	-7.544.350,00	20 Orang	26.000.000,00
2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja											
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Magetan	Kab. Magetan	27.500.000,00	27.500.000,00	19.955.650,00	-7.544.350,00	1 Dokumen	26.000.000,00
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Presentase Pencari Kerja yang Mendapat Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja	100 Persen	100 Persen			512.750.000,00	512.750.000,00	423.292.100,00	-89.457.900,00	-	412.300.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			TARGET 2025		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/(BE RKURANG)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10-9)	12	13
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Fasilitas Pelayanan Antar Kerja	1500 Orang	1500 Orang			228.500.000,00	228.500.000,00	177.625.400,00	-50.874.600,00	2500 Orang	142.500.000,00
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan Antar Kerja											
		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	1500 Orang	1500 Orang	Kab. Magetan	Kab. Magetan	44.000.000,00	44.000.000,00	34.562.950,00	-9.437.050,00	1200 Orang	44.500.000,00
2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja											
		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	30 Orang	60 Orang	Kab. Magetan	Kab. Magetan	32.000.000,00	32.000.000,00	19.535.350,00	-12.464.650,00	200 Orang	28.000.000,00
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja											
		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	65 Orang	65 Orang	Kab. Magetan	Kab. Magetan	152.500.000,00	152.500.000,00	123.527.100,00	-28.972.900,00	30 Orang	70.000.000,00
2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang Mendapatkan Izin, Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	5 Lembaga	5 Lembaga			5.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	-4.000.000,00	5 Lembaga	2.800.000,00
2.07.04.2.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS											
		Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	5 Lembaga	5 Lembaga	Kab. Magetan	Kab. Magetan	5.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	-4.000.000,00	5 Lembaga	2.800.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			TARGET 2025		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/(BE RKURANG)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10-9)	12	13
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Penyediaan Lowongan Informasi Pasar Kerja	50 Lowongan	500 Lowongan			200.750.000,00	200.750.000,00	192.814.000,00	-7.936.000,00	200 Lowongan	196.500.000,00
2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online											
		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2500 Orang	2500 Orang	Kab. Magetan	Kab. Magetan	3.000.000,00	3.000.000,00	1.592.000,00	-1.408.000,00	2500 Orang	1.500.000,00
2.07.04.2.03.0003	Job Fair /Bursa Kerja											
		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	750 Orang	750 Orang	Kab. Magetan	Kab. Magetan	197.750.000,00	197.750.000,00	191.222.000,00	-6.528.000,00	750 Orang	195.000.000,00
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	-	25 Orang	25 orang			78.500.000,00	78.500.000,00	51.852.700,00	-26.647.300,00	80 Orang	70.500.000,00
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)											
		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	25 Orang	25 Orang	Kab. Magetan	Kab. Magetan	45.000.000,00	45.000.000,00	22.852.700,00	-22.147.300,00	80 Orang	36.000.000,00
2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna Penempatan											
		Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	20 Orang	20 Orang	Kab. Magetan	Kab. Magetan	33.500.000,00	33.500.000,00	29.000.000,00	-4.500.000,00	20 Orang	34.500.000,00
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Presentase Penyelesaian Perselisihan Kasus Ketengakerjaan	100 Persen	100 Persen			264.900.000,00	300.180.480,00	625.427.130,00	360.527.130,00	-	365.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			TARGET 2025		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/(BE RKURANG)	11 = (10-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10-9)	12	13
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola yang baik	5 Perusahaan	5 Perusahaan			8.500.000,00	8.500.000,00	1.088.400,00	-7.411.600,00	11 Perusahaan	5.000.000,00
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan											
		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Magetan	Kab. Magetan	8.500.000,00	8.500.000,00	1.088.400,00	-7.411.600,00	1 Laporan	5.000.000,00
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kasus ketenagakerjaan secara bipartit	4 Perkara	4 Perkara			256.400.000,00	291.680.480,00	624.338.730,00	367.938.730,00	4 Perkara	360.000.000,00
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											
		Jumlah Perselisihan yang Dioegah	40 Perkara	40 Perkara	Kab. Magetan	Kab. Magetan	48.000.000,00	48.000.000,00	40.677.250,00	-7.322.750,00	40 Perkara	33.000.000,00
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											
		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terelesaikan	4 Perkara	4 Perkara	Kab. Magetan	Kab. Magetan	12.400.000,00	12.400.000,00	5.298.450,00	-7.101.550,00	4 Perkara	7.000.000,00
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota											
		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	Kab. Magetan	Kab. Magetan	46.000.000,00	46.000.000,00	36.068.550,00	-9.931.450,00	1 Lembaga	70.000.000,00
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja											

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			TARGET 2025		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/(BE RKURANG)	11 = (10-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10-9)	12	13
		<i>Tertelaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja</i>	1370 Orang	7032 Orang	Kab. Magetan	Kab. Magetan	150.000.000,00	185.280.480,00	542.294.480,00	392.294.480,00	2440 Orang	250.000.000,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						76.100.000,00	76.100.000,00	0,00	-76.100.000,00		65.000.000,00
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						76.100.000,00	76.100.000,00	0,00	-76.100.000,00		65.000.000,00
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penempatan transmigran yang terseleksi dan terlatih	100 Persen	0 Persen			76.100.000,00	76.100.000,00	0,00	-76.100.000,00	100 Persen	65.000.000,00
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah calon transmigran yang terseleksi, mendapat pelatihan dan diberangkatkan	2 KK	0 KK			76.100.000,00	76.100.000,00	0,00	-76.100.000,00	2 Kepala Keluarga	65.000.000,00
3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											
		<i>Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan</i>	0 Kepala Keluarga	0 Kepala Keluarga	Kab. Magetan	Kab. Magetan	76.100.000,00	76.100.000,00	0,00	-76.100.000,00	2 Kepala Keluarga	65.000.000,00

D. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025 dan perubahannya

1. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DINAS TENAGA KERJA

Jalan Samodra 98 Magetan, Jawa Timur 63318

Telepon/Fax. (0351) 894521

Website : <http://disnaker.magetan.go.id> Email : disnaker@magetan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. ARIEF RIDWAN, MM**
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **NIZHAMUL, S.E, M.M**
Jabatan : Pj. Bupati Magetan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Magetan, Januari 2025


BUPATI
Pihak Kedua,
NIZHAMUL, S.E, M.M


PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS TENAGA KERJA
Drs. ARIEF RIDWAN, MM,
Pemimpin Utama Muda (IV/c)
NIP 196605161986031005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Akses Ke Peluang Kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja	77,50 %
2.	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	35,42 Juta rp/tenaga kerja
3.	Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Tenaga Kerja	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja	90,17
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja	86

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.555.470.028,-	-
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp. 133.750.000,-	-
3	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 847.422.000,-	-
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 512.750.000,-	-
5	Program Hubungan Industrial	Rp. 300.180.480,-	-
6	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp. 76.100.000,-	-
JUMLAH		Rp. 5.425.672.508,-	

Magetan, Januari 2025

BUPATI MAGETAN



NIZHAMUL, S.E, M.M

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MAGETAN



Drs. ANIET RIDWAN, MM.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196605161986031005

2. Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DINAS TENAGA KERJA

Jl. Samodra No. 98 Magetan, Jawa Timur 63315
Telepon/Fax (0351) 894521, Laman disnaker.magetan.go.id, Pos-el disnaker@magetan.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs ARIEF RIDWAN, MM.
Jabatan : KEPALA DINAS TENAGA KERJA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. NANIK ENDANG RUSMINIARTI, M.Pd.
Jabatan : Bupati Magetan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.



Hj. NANIK ENDANG RUSMINIARTI, M.Pd.

Magetan, November 2025
Pihak Pertama,



Drs ARIEF RIDWAN, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 196605161986031005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS TENAGA KERJA**

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Akses ke Peluang Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	77.10 %
2	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	37.14 juta rp/tenaga kerja
3	Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Tenaga Kerja	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja	90.17 Skor
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja	86 Skor

No	Program	Anggaran	Ket
1.1	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	106.606.800	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.2	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	423.292.100	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.3	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	0	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Program	Anggaran	Ket
2.1	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.178.523.650	Dana Alokasi Umum (DAU), DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
2.2	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	625.427.130	Dana Alokasi Umum (DAU), DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
3.1	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.410.386.503	Dana Alokasi Umum (DAU)

Bupati Magetan



H. NANIK ENDANG RUSMINIARTI, M.Pd.

Magetan, November 2025
KEPALA DINAS TENAGA KERJA,



DR. ARIEF RIDWAN, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 196605161986031005

E. Pengukuran Kinerja

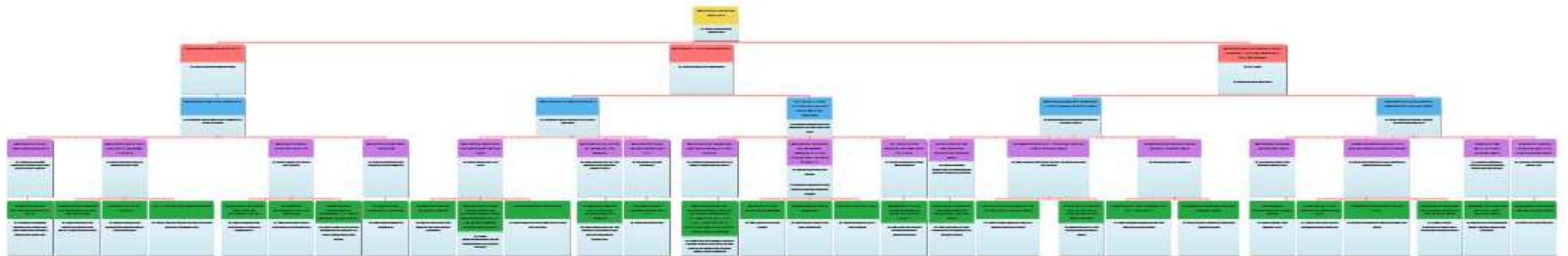
Capaian Kinerja (Induk) Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya Akses Ke Peluang Kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja	77,50 %	77,61%	100,14
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	35,42 Juta rp/tenaga kerja	40,04 Juta rp/tenaga kerja	107,81
Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Tenaga Kerja	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja	90,17	90,94	100,85
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja	86	87,72	102

Capaian Kinerja (Perubahan) Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya Akses ke Peluang Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	77.10 %	74,70	96,89
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	37.14 juta rp/tenaga kerja	40,04 Juta rp/tenaga kerja	107,81
Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Tenaga Kerja	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja	90.17 Skor	90,94 Skor	100,85
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja	86 Skor	87,72 Skor	102

F. Pohon Kinerja



G. Rencana Aksi Tahun 2026

RENCANA AKSI TAHUN 2025 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN

No.	Sasaran Strategik	Indikator Kinerja	Target	Program	Indikator Program	Target	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Target	Rencana Aksi	Satuan	Target Kegiatan Per Triwulan					Anggaran	Penanggung Jawab
															I	II	III	IV	Jml		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	20	21
	Meningkatnya Akses ke Peluang Kerja	TPAK	77,15%	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri dan luar negeri	78%	2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Pelayanan Antar Kerja	2000 orang	2.07.04.2.01.002 Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Luar Negeri (AKL)	1200 orang	Terlaksananya pelayanan antar kerja bagi pemberi kerja	Perusahaan	1	1	1	1	4	30.000.000	Bidang Pentalattas
														Orang	400	400	400	400	1600		Bidang Pentalattas
														Laporan	3	3	3	3	12		Bidang Pentalattas
										2.07.04.2.01.003	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	100 orang	Terlaksananya kegiatan penyuluhan jabatan bagi pencari kerja	Kegiatan	0	1	0	0	1	20.000.000	Bidang Pentalattas
														Orang	50	100	50	50	250		
														Laporan	0	1	0	0	1		
										2.07.04.2.01.005	Jumlah Tenaga Kerja yang Diperdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	25 orang	Terlaksananya kegiatan perluasan kesempatan kerja	Kegiatan	0	0	1	0	1		Bidang Pentalattas
														Orang	0	0	25	0	25		
														Laporan	0	0	1	0	1		

No.	Sasaran Strategik	Indikator Kinerja	Target	Program	Indikator Program	Target	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Target	Rencana Aksi	Satuan	Target Kegiatan Per Triwulan					Anggaran	Penanggung Jawab
															I	II	III	IV	Jml		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	20	21
							2.07.04.2.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang dilakukan monitoring dan pembinaan	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang dilakukan monitoring dan pembinaan	4 lembaga	2.07.04.2.02.002 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	4 lembaga	Terlaksananya pendataan dan pemutakhiran data LPTKS	Lembaga	5	0	0	0	5	1.800.000	Bidang Pentalattas
														Lembaga	0	0	0	5	5		
														Laporan	0	0	0	1	1		
							2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Penyediaan Lowongan Informasi Pasar Kerja	1000 lowongan	2.07.04.2.03.002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdftar dalam Pasar Kerja melalui Sistem Online (Karir Hub)	2500 orang	Terselenggaranya pelayanan AK1 secara online	Orang	300	600	300	300	1500	1.500.000	Bidang Pentalattas
														Lowongan	50	850	50	50	1000		Bidang Pentalattas
										2.07.04.2.03.003 Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapat pekerjaan melalui Jobfair/bursa kerja	375 orang	Terlaksananya kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	Kegiatan	0	1	0	0	1	100.000.000	Bidang Pentalattas
														Perusahaan	0	20	0	0	20		
														Laporan	0	0	1	0	1		Bidang Pentalattas

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Indikator Program	Target	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Target	Rencana Aksi	Satuan	Target Kegiatan Per Triwulan					Anggaran	Penanggung Jawab
															I	II	III	IV	Jml		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	20	21
							2.07.04.2.04 Pelindungan PMI	Jumlah Calon Pekerja Migran (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	80 orang	2.07.04.2.04.001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia	Jumlah CPMI / PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	60 orang	Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi informasi penempatan dan pelindungan CPMI/PMI	Kegiatan	0	0	1	0	1	26.000.050	Bidang Pentalattas
													Terlaksananya fasilitas layanan pelindungan PMI	Orang	2	2	2	2	8		
													Tersusunnya laporan pelaksanaan peningkatan pelindungan dan kompetensi CPMI/PMI	Laporan	0	0	0	1	1		
										2.07.04.2.04.003 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna yang Diberdayakan	20 orang	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan PMI purna penempatan	Kegiatan	0	0	0	1	1	30.000.000	Bidang Pentalattas
													Meningkatnya kompetensi kewirausahaan PMI purna penempatan	Orang	0	0	0	20	20		
													Tersusunnya laporan pelaksanaan pemberdayaan PMI purna penempatan	Laporan	0	0	0	1	1		
				3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang ditempatkan	100%	3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1	Jumlah Penempatan Transmigrasi yang Berkompeten	1 KK	3.32.03.2.01.004 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	1 KK	Terfasilitasinya pemindahan dan penempatan transmigran asal 1 (satu) Kabupaten/Kota secara tertib dan partisipatif	Kegiatan	0	0	0	4	4	48.000.000	Bidang Hubinsyakertrans

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Indikator Program	Target	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Target	Rencana Aksi	Satuan	Target Kegiatan Per Triwulan					Anggaran	Penanggung Jawab
															I	II	III	IV	Jml		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	20	21
													Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat sasaran terhadap program Transmigrasi melalui kegiatan penyuluhan	Kegiatan	12	12	12	12	48		
													Meningkatnya kesiapan masyarakat dalam Pelatihan Transmigrasi	Kegiatan	0	2	4	0	6		
													Terfasilitasinya koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi asal 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kegiatan	18	18	18	18	72		
				2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Meningkatnya persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100%	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Yang Disusun	1 Dokumen	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	20 orang	Terlaksananya fasilitasi teknis kepada perusahaan dalam penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Perusahaan	20	0	0	0	20	7.500.000	Bidang Pentalattas
	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	37.21 juta/tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi	100%	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi	20 orang	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja/Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada tahun n	140 orang	Terlaksananya perencanaan pendidikan dan pelatihan berbasis klaster kompetensi	Klaster	7	0	0	0	7	554.000.000	Bidang Pentalattas
													Terlaksananya pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Pelatihan	0	3	4	0	7		
													Tersedianya narasumber pelatihan sesuai kebutuhan	Orang	0	6	8	0	14		
													Meningkatnya kompetensi pencari kerja sesuai klaster	Orang	0	80	80	0	160		
													Tersedianya bahan praktik pelatihan sesuai kebutuhan	Paket	0	3	4	0	7		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Indikator Program	Target	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Target	Rencana Aksi	Satuan	Target Kegiatan Per Triwulan					Anggaran	Penanggung Jawab
															I	II	III	IV	Jml		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	20	21
													Tersedianya informasi pembukaan pendaftaran pelatihan yang mudah diakses masyarakat	Kali	3	4	0	0	7		Bidang Pentalattas
													Tersedianya kuesioner pelatihan serta hasil pengolahan data kuesioner	Dokumen	0	3	4	0	7		Bidang Pentalattas
													Tersusunnya Modul Pelatihan	Modul	0	3	4	0	7		Bidang Pentalattas
													Tersusunnya Laporan Pelatihan yang telah Dilaksanakan	Laporan	0	0	3	4	7		Bidang Pentalattas
													Terlaksananya seleksi calon peserta pelatihan	Orang	0	72	98	0	170		Bidang Pentalattas
													Tersedianya basis data pelatihan yang akurat dan mutakhir	Data/Pelatihan	0	3	4	0	7		Bidang Pentalattas
													Terkelolanya Media Sosial Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Kali	3	4	4	3	14		Bidang Pentalattas
										Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kecepatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada tahun n	3 lembaga	Terjalannya kerja sama atau Mou atau Kerjasama dengan sektor swasta/DUDI	Dokumen	0	1	2	0	3	5.000.000	Bidang Pentalattas
													Tersedianya data LPKS dan BLKK di Kabupaten Magetan yang akurat dan mutakhir	Lembaga	0	0	10	10	20		
							Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Terakreditasi	7 lembaga	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20 lembaga	Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis bagi LPK Swasta	Kegiatan	1	0	0	0	1	25.000.000	Bidang Pentalattas
													Terlaksananya Verifikasi Pengajuan Izin Operasional LPKS melalui Aplikasi OSS	Dokumen	0	1	0	2	3		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Indikator Program	Target	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Target	Rencana Aksi	Satuan	Target Kegiatan Per Triwulan					Anggaran	Penanggung Jawab
															I	II	III	IV	Jml		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	20	21
													Tersedianya narasumber bimbingan teknis LPKS	Orang	1	0	0	0	1		Bidang Pentalattas
													Terlaksananya monitoring dan evaluasi LPK Swasta	Kegiatan	0	1	0	1	2		Bidang Pentalattas
													Terpenyuhnya peserta Bimbingan Teknis LPKS	Orang	20	0	0	0	20		Bidang Pentalattas
							Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti Kegiatan Peningkatan dan Pengukuran Produktivitas	20 orang	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 dokumen	Terselenggaranya penyuluhan/bimbingan teknis produktivitas bagi perusahaan mikro dan kecil		0	1	0	0	1	20.000.000	Bidang Pentalattas
													Tersedianya Kuisiner dan Pengolahan Data Kuisiner Penyuluhan		0	1	0	0	1		
													Tersedianya materi penyuluhan/bimbingan teknis		0	1	0	0	1		
													Tersedianya narasumber		0	1	0	0	1		
				Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	40%	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan dan Perjanjian Kerja Bersama yang didaftarkan	11 Dokumen	Penyelenggaraan n Pendaftaran dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit dan Pekerja yang terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 laporan	Terlaksananya pendataan perusahaan terkait sarana dan informasi hubungan industrial	Laporan	3	3	3	3	12	4.129.950	Bidang Hubinsyakertra ns
													Tersedianya Data leadministrasian Perusahaan	Laporan	2	1	1	2	6		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Indikator Program	Target	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Target	Rencana Aksi	Satuan	Target Kegiatan Per Triwulan					Anggaran	Penanggung Jawab
															I	II	III	IV	Jml		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	20	21
							Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kasus ketenagakerjaan secara bipartit	4 perkara	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	40 perkara	Terlaksananya pembinaan hubungan industrial	Kegiatan	3	3	3	3	12	20.000.000	Bidang Hubinsyakertrans
													Terlaksananya fasilitasi komunikasi dan konsultasi hubungan industrial	Kegiatan	3	3	3	3	12		Bidang Hubinsyakertrans
													Tersusunnya laporan pelaksanaan pengesahan perselisihan HI	Laporan	0	0	0	1	1		Bidang Hubinsyakertrans
										Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Tersesalkan	4 perkara	Terlaksananya penerimaan dan pencatatan laporan perselisihan hubungan industrial	Laporan	1	1	1	1	4	4.000.000	Bidang Hubinsyakertrans
													Terselekskannya Proses Fasilitasi / Mediasi Dalam Rangka Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Perkara	1	1	1	1	4		Bidang Hubinsyakertrans

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Indikator Program	Target	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Target	Rencana Aksi	Satuan	Target Kegiatan Per Triwulan					Anggaran	Penanggung Jawab
															I	II	III	IV	Jml		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	20	21
													Analisa Dampak Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Terhadap Kepentingan Daerah	Laporan	0	0	0	1	1		Bidang Hubinsyakertrans
													Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Lintas Instansi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Kegiatan	3	3	3	3	12		Bidang Hubinsyakertrans
										Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibangun	1 lembaga	Tersusunnya rekomendasi LKS Tripartit kepada pemerintah daerah	Rekomendasi	0	1	0	0	1	45.000.000	Bidang Hubinsyakertrans
													Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja LKS Tripartit	Kegiatan	0	2	0	0	2		
													Terlaksananya pembahasan isu strategis ketenagakerjaan daerah	Kegiatan	3	3	3	3	12		
													Terlaksananya koordinasi lintas pemangku kepentingan ketenagakerjaan	Kegiatan	1	1	1	1	4		
													Terlaksananya kegiatan LKS Tripartit	Kegiatan	0	1	0	1	2		
													Terlaksananya Fasilitasi Dialog Sosial Tripartit	Kegiatan	0	0	0	1	1		
													Tersusunnya Laporan Operasional LKS Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	0	1	1		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Indikator Program	Target	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Target	Rencana Aksi	Satuan	Target Kegiatan Per Triwulan					Anggaran	Penanggung Jawab
															I	II	III	IV	Jml		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	20	21
										Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2440 orang	Terlaksananya pembinaan perusahaan terkait pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja	Kegiatan	0	1	0	1	2	250.000.000	Bidang Hubinsyakertrans
													Tersusunnya laporan pengembangan jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja	Laporan	0	0	1	1	2		
													Terlaksananya pendataan perusahaan dan pekerja terkait jaminan sosial tenaga kerja	Laporan	3	3	3	3	12		
													Terlaksananya koordinasi lintas instansi terkait jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja	Kegiatan	1	1	1	1	4		
													Terlaksananya Sosialisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Kegiatan	0	1	0	1	2		
													Terbentuknya Produk Hukum Terkait Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Dokumen	0	1	1	0	2		
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Tenaga Kerja	Nilai SAKIP	91 Nilai	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotora	Indeks Kepuasan Layanan Kecsekretariat	81 indeks	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	42 Dokumen		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	Tersusunnya bahan dan draft dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	3	3	1	4	11	15.000.000	Sekretariat
	Indeks Kepuasan Masyarakat	86 skor		Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31 Laporan	Tersusunnya bahan dan draft laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	17	14	17	17	65	15.000.000	Sekretariat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Indikator Program	Target	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Target	Rencana Aksi	Satuan	Target Kegiatan Per Triwulan					Anggaran	Penanggung Jawab
															I	II	III	IV	Jml		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	20	21
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Deviasi Serapan Anggaran Perangkat Daerah	6,19%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Tunjangan ASN	406 orang	Terlaksananya verifikasi dan validasi data gaji ASN	Orang/bulan	116	116	87	87	406	3.030.102.075	Sekretariat
													Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	25	25	25	25	100		
													Tersusunnya administrasi gaji dan tunjangan ASN secara tertib dan akuntabel	%	25	25	25	25	100		
													Tertibnya pengarsipan dokumen gaji dan tunjangan	%	25	25	25	25	100		
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	37 laporan	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara tepat waktu dan akurat	Laporan	10	9	9	9	37	5.000.000	Sekretariat
													Terselenggaranya pengelolaan dan penyetoran pajak belanja daerah	%	25	25	25	25			
													Terselenggaranya pengelolaan pengeluaran keuangan OPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	%	25	25	25	25			
													Tersusunnya dokumen pertanggungjawaban kegiatan secara lengkap dan tertib	%	25	25	25	25			

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Indikator Program	Target	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Target	Rencana Aksi	Satuan	Target Kegiatan Per Triwulan					Anggaran	Penanggung Jawab
															I	II	III	IV	Jml		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	20	21
													Tertibnya pengarsipan dokumen keuangan	%	25	25	25	25			
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur	35 orang	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	35 Orang	Terlaksananya fasilitasi dan administrasi kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan	Kegiatan	0	1	0	0	1	6.250.000	Sekretariat
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 paket	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	Tersedianya dan terkelolanya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor secara memadai, aman, dan sesuai standar	Paket	25	25	25	25	100	5.000.000	Sekretariat
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai, tertib administrasi, dan mendukung kelancaran operasional	%	25	25	25	25	100	10.150.032	Sekretariat	
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 paket	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor yang memadai, tercatat, dan mendukung kelancaran operasional	%	25	25	25	25	100	19.500.000	Sekretariat	
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	Tersedianya bahan logistik kantor yang memadai, tercatat, dan mendukung kelancaran operasional	%	25	25	25	25	100	13.000.000	Sekretariat	
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	Tersedianya barang cetak dan hasil penggandaan yang tepat waktu, sesuai kebutuhan, dan tertib administrasi	%	25	25	25	25	100	15.000.000	Sekretariat	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Indikator Program	Target	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Target	Rencana Aksi	Satuan	Target Kegiatan Per Triwulan					Anggaran	Penanggung Jawab
															I	II	III	IV	Jml		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	20	21
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dokumen	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang mutakhir, tertata, dan mudah diakses untuk mendukung pelaksanaan tugas	%	25	25	25	25	100	6.620.000	Sekretariat
										Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD secara tertib, tepat waktu, dan terdokumentasi	%	25	25	25	25	100	26.500.000	Sekretariat
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Tersedianya layanan komunikasi, air, dan listrik kantor secara berkelanjutan, tepat waktu, dan tertib administrasi	%	25	25	25	25	100	40.331.240	Sekretariat
								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 laporan	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai, berfungsi baik, dan tertib administrasi	%	25	25	25	25	100	11.000.000	Sekretariat	
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Terselenggaranya jasa pelayanan umum kantor secara optimal, tertib, dan mendukung kelancaran operasional	%	25	25	25	25	100	234.000.000	Sekretariat	
													Tersedianya dokumen administrasi umum perkantoran	Dokumen	3	3	3	3	12		Sekretariat

No.	Sasaran Strategik	Indikator Kinerja	Target	Program	Indikator Program	Target	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Target	Rencana Aksi	Sebaran	Target Kegiatan Per Triwulan					Anggaran	Panggung Jawab	
															I	II	III	IV	Jml			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	20	21	
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	15 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya II unit	2 unit	Terpeliharanya kendaraan dinas perorangan/jabatan dalam kondisi laik operasional dan tertib administrasi	Kegiatan							47.000.000	Sekretariat
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya II unit	10 unit	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional/lapangan dalam kondisi laik jalan, patuh pajak dan perizinan, serta tertib administrasi	Kegiatan	3	3	3	3	12	10.500.000	Sekretariat	
										Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Kegiatan	0	1	0	0	1	10.000.000	Sekretariat	